

SKRIPSI

**PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
(TPAK) DAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR)
TERHADAP PENGANGGURAN DI PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh :

**MELYA NURTIWI NINGSI
NIM. 180604101**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melya Nurtiwi Ningsi

NIM : 180604101

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidka melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2023

Yang Menyatakan



Melya Nurtiwi Ningsi

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh

Disusun Oleh:

Melya Nurtiwi Ningsi

NIM: 180604101

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



A. Rahmat Adi, S.E., M.Si
NIDN. 2025027902

Pembimbing II,



Jalilah, S.HI., M.Ag
NIP. 198806082023212040

جامعة الرانيري
Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi,



Cut Dian Fitri, M.Si., Ak, CAI
NIP. 198307092014032002

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh

Melya Nurtiwi Ningsi

NIM: 180604101

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ilmu Ekonomi


Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Juli 2023 M

08 Muharram 1445 H


Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


A. Rahmat Adi, S.E., M.Si
NIDN. 2025027902


Sekretaris,


Jalilah, S.HI., M.Ag
NIP. 198806082023212040

Penguji I,


Dr. Jariah Abu Bakar, SE., M.Si
NIP. 197508282005012001

Penguji II,


Ulya Azra, M.Si
NIP. 199410022022032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Nafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Melya Nurtiwi Ningsi
NIM : 180604101
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
E-mail : 190604028@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Juli 2023

Mengetahui,

Penulis,

Melya Nurtiwi Ningsi
NIM: 190604028

Pembimbing I,

A. Rahmat Adi, S.E., M.Si
NIDN. 2025027902

Pembimbing II,

Jafifah, S.HI., M.Ag
NIP. 198806082023212040

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam. Dengan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul penelitian, **“Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penyusunan Skripsi ini, kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Cut Dian Fitri, S.E.,M.Si., Ak selaku ketua Prodi Ilmu Ekonomi dan Ana Fitria, M.Sc Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Ekonomi.
3. Hafiih Maulana S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Labolatorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. A. Rahmad Adi, SE., M.Si sebagai Pembimbing I saya sekaligus penasehat akademik dan Jalilah S.HI., M.Ag selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Jariah Abu Bakar, SE., M.Si selaku Penguji I dan Uliya Azra, M.Si selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran dalam skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas UIN Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu serta arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi.
7. Terima kasih kepada kedua Orang Tua dan saudara-saudara saya tercinta, penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Yahman dan Ibunda Halimah atas segala kasih sayang, didikan, pengorbanan, dorongan, kepercayaan, dukungan moral, material, nasihat serta doa yang tak terhingga.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Sarah, Najwa, Arlina, Sumarni, Ria, Safira, dan Uti yang telah memberikan dukungan besar, bantuan dan semangat tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik.

9. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada orang terkasih, saudara, kerabat dekat, maupun teman terkhusus untuk Irwan Sahputra, Muntasir, mutia, Mursalin, rayma, tim kerja di Qeez Pancake dan lainnya juga teman-teman Ilmu Ekonomi angkatan 2018, terimakasih dukungannya baik diperkuliahan maupun di luar perkuliahan, segala suport serta bantuan yang telah diberikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran atau ide-ide yang bersifat membangun dan bermanfaat dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan pengetahuan umumnya dan masyarakat yang terkait khususnya.

Banda Aceh 03 Mei 2023

Penulis,

Melya Nurtiwi Ningsi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يِ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يُقَالُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

c. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

d. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

e. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

raudah al-atfal/raudatul atfal : روضة الاطفال / روضة الاطفال

al-madinah al-munawwarah/ : المدينة المنورة

al-madinatul munawwarah

talhah : طلحة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Melya Nurtiwi Ningsi
NIM : 180604101
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh
Pembimbing I : A. Rahmad Adi, SE., M.Si
Pembimbing II : Jalilah, S.HI.,M.Ag
Kata Kunci : Upah Minimum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan pengangguran

Masalah ketenagakerjaan menjadi satu dari banyaknya polemik di suatu negara atau daerah. Peningkatan jumlah pengangguran dapat terjadi karena banyak faktor, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) di wilayah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan model analisis regresi linier berganda berbentuk data panel. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran dan Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh periode Tahun 2012-2022, dan secara simultan menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) memiliki pengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Aceh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penelitian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Pengangguran.....	15
2.1.1 Pengertian Pengangguran.....	15
2.1.2 Jenis – Jenis Pengangguran.....	16
2.1.3 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pengangguran.....	20
2.1.4 Dampak Pengangguran.....	23
2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	28
2.2.1 Pengertian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	28

2.2.2	Konsep Ketenagakerjaan.....	29
2.2.3	Teori Ketenagakerjaan	32
2.2.4	Produktifitas Pekerja	35
2.3	Upah Minimum Regional (UMR).....	36
2.3.1	Pengertian Upah Minimum	36
2.3.2	Penggolongan Upah	37
2.3.3	Teori Pembentukan Harga Upah	38
2.3.4	Faktor-Faktor yang Menimbulkan Perbedaan Upah ...	39
2.4	Pengaruh Antar Variabel.....	42
2.4.1	Pengaruh Tingkat Partipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pengangguran.....	42
2.4.2	Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Pengangguran.....	43
2.6	Penelitian Terkait	44
2.7	Kerangka Pikir	53
2.8	Hipotesis.....	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		55
3.1	Desain Penelitian.....	55
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	55
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.4	Definisi dan Operasional Variabel.....	56
3.5	Metode dan Teknik Analisis Data.....	57
3.5.1	Metode Analisis Data	57
3.5.2	Uji Goodness Of Fit	59
3.5.3	Teknik Analisis Data.....	61
3.6	Pengujian Hipotesis	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		65
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65

4.1.1 Kondisi Geografis	65
4.2 Deskripsi Penelitian	67
4.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	69
4.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70
4.2.3 Upah Minimum Regional (UMR).....	71
4.3 Estimasi Regresi Data Panel.....	72
4.3.1 Chow Test.....	72
4.3.2 Hausman Test	73
4.3.3 Model Regresi Panel <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	74
4.4 Uji Signifikansi (Uji T).....	76
4.5 Uji Simultan (Uji F).....	77
4.6 Pembahasan Penelitian	77
4.6.1 Pengaruh TPAK Terhadap Pengangguran	77
4.6.2 Pengaruh UMR Terhadap Pengangguran	79
BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	49
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian	57
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk per-Kabupaten di Provinsi Aceh	66
Tabel 4. 2 Data Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) mulai dari tahun 2012 s/d 2022	68
Tabel 4. 3 Hasil Chow Test	73
Tabel 4. 4 Hasil Hausman Test.....	74
Tabel 4. 5 Hasil Fixed Effect Model	75
Tabel 4. 6 Hasil Uji T	76
Tabel 4. 7 Hasil Uji F	77



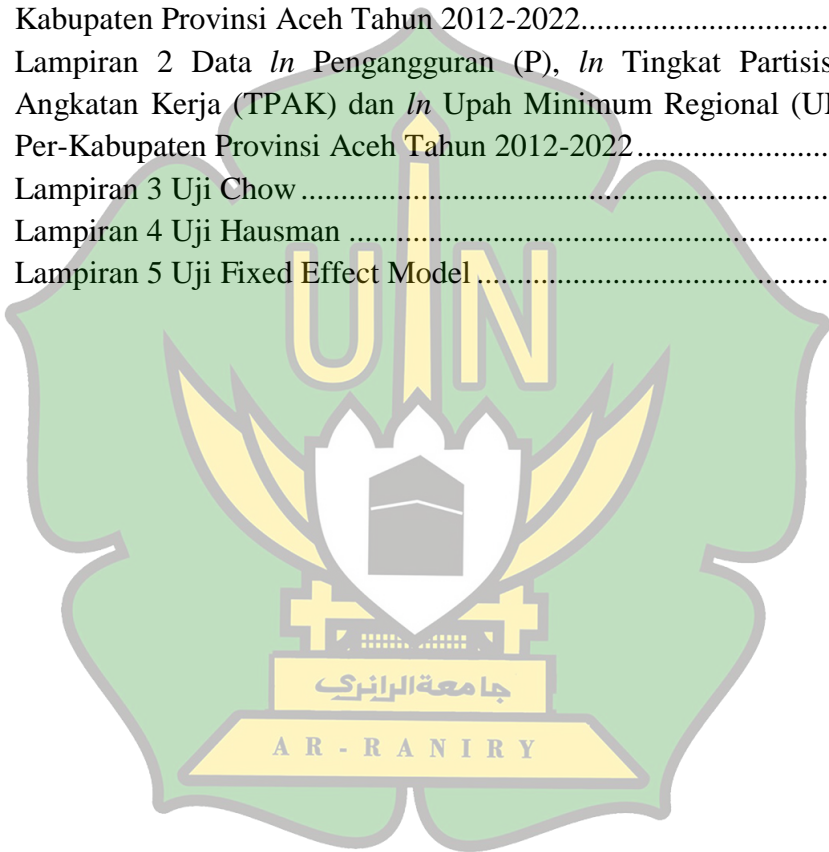
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Tingkat Pengangguran di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022.....	2
Gambar 1. 2 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022.....	7
Gambar 1. 3 Grafik Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Aceh Tahun 2018-2022	9
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	53
Gambar 4. 1 Peta Provinsi Aceh.....	65
Gambar 4. 2 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh 2012-2022.....	69
Gambar 4. 3 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Aceh.....	70
Gambar 4. 4 Grafik Upah Minimum Regional Provinsi Aceh 2012-2022	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pengangguran (P), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) Per-Kabupaten Provinsi Aceh Tahun 2012-2022.....	89
Lampiran 2 Data <i>ln</i> Pengangguran (P), <i>ln</i> Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan <i>ln</i> Upah Minimum Regional (UMR) Per-Kabupaten Provinsi Aceh Tahun 2012-2022.....	97
Lampiran 3 Uji Chow	105
Lampiran 4 Uji Hausman	106
Lampiran 5 Uji Fixed Effect Model	107



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

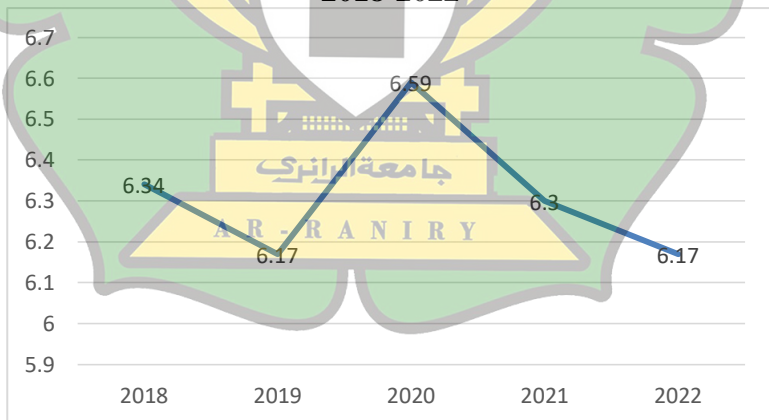
Masalah ketenagakerjaan merupakan satu dari banyaknya polemik serius yang perlu diatasi di suatu negara atau daerah. Keadaan ini dapat muncul karena banyaknya jumlah angkatan kerja yang masih belum memperoleh pekerjaan, semakin meningkat namun tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja yang mencukupi. Angkatan kerja yang besar tentu membutuhkan adanya lapangan pekerjaan yang mencukupi namun kenyataannya kondisi lowongan kerja pada lapangan yang dibutuhkan tidak tersedia sebanyak angkatan kerja yang ada. Kondisi jumlah angkatan kerja yang meningkat tinggi dibanding dengan ketersediaan kesempatan kerja yang ada akan mengakibatkan tingkat pengangguran lebih meningkat (Fadilah, P. 2018).

Peningkatan jumlah pengangguran terjadi diakibatkan meningkatnya jumlah angkatan kerja dan diakibatkan juga oleh ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi yang kemudian gagal menghadirkan lowongan kerja baru. Pada negara berkembang masalah pengangguran selalu sulit direda karena banyaknya hambatan yang ditemui, seperti minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, tingginya peningkatan kependudukan,

kelangkaan atau kurangnya investasi, kondisi sosial dan masalah politik yang menjadikan masalah pengangguran pada negara berkembang sulit teratasi (Kartika dan Muslim, 2020).

Negara Indonesia termasuk sebagai salah satu negara berkembang yang mana juga mengalami masalah pengangguran seperti pada negara lainnya secara bertahun-tahun, dimana tingkat pengangguran di negara Indonesia setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Hal serupa ini dirasakan oleh daerah-daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Aceh, dimana tingkat pengangguran di Provinsi Aceh dilihat pada laman BPS Aceh mengalami hal yang sama, berikut grafik tingkat pengangguran di Provinsi Aceh tahun 2018 sampai 2022 :

Gambar 1.1 Grafik Pengangguran di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Aceh (2023)

Pada grafik Gambar 1.1, diketahui periode tahun 2018 sampai 2022 kondisinya cenderung tidak stabil, dimana terjadi

penurunan tahun 2019 yaitu sebesar 6.17%, kemudian menyusul tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 6.59% yang pada saat itu disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19, banyak pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sehingga meningkatnya angka pengangguran. Kemudian ditahun 2021 kondisi pengangguran di Provinsi Aceh turun sebesar 6,3% dan ditahun berikutnya juga mengalami penurunan kembali sebesar 6,17%, hal ini terjadi karena adanya kondisi pemulihan ekonomi setelah meredanya wabah Covid-19. Keadaan ini tentu dapat mempengaruhi banyak aspek ekonomi di Aceh termasuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR).

pemerintah memiliki peran yang diupayakan dalam mengatasi angka pengangguran, namun upaya yang dijalankan pemerintah guna meningkatkan produktivitas serta menghasilkan lapangan kerja seringkali tidak tersampai ke seluruh kelompok atau golongan masyarakat itu sendiri. Peluang serta kesempatan yang dimiliki setiap penduduk pasti berbeda antara satu dengan individu lainnya, begitu pula dalam kegiatan proses pembangunan, tingkat penduduk dan angka pengangguran yang tinggi menjadi nilai negatif dari peningkatan pembangunan yang kemudian terciptanya kondisi kesenjangan sosial, dan ini dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dari kondisi pasar tenaga kerja, dimana

pasar tenaga kerja tidak sanggup menyerap ataupun menampung tenaga kerja yang ada. Ini merupakan dampak dari penawaran (*supply*) tenaga kerja yang ada di pasar tenaga kerja dimana telah melebihi kapasitas permintaan (*demand*) tenaga kerja dalam pemenuhan atau memenuhi kesempatan kerja yang telah tersedia (Izzah, 2015).

Pengangguran merupakan ketidakmampuan angkatan kerja dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria pekerjaan yang mereka inginkan atau yang dibutuhkan. Disimpulkan maka, pengangguran ialah keadaan atau kondisi seseorang yang telah tergolong dalam angkatan kerja namun belum memperoleh pekerjaan dan sedang berusaha memperoleh pekerjaan sesuai dengan kriteria atau kebutuhan yang dibutuhkan (Kartika dan Muslim, 2020).

Penelitian oleh Kartika dan Muslim, (2020) menyebutkan ada banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran itu sendiri di suatu wilayah, akan tetapi terdapat empat faktor yang sebutkan diantaranya ialah pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) serta upah minimum regional (UMR). Namun pada penelitian ini, peneliti hanya memilih dan memfokuskan pada dua faktor saja yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) serta upah minimum regional.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menjadi salah satu tolak ukur yang kerap digunakan dalam melihat dampak dari partisipasi penduduk usia kerja itu sendiri dalam kontribusinya di lingkup kegiatan ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat diartikan sebagai alat perbandingan pada penduduk yang ada dalam kegiatan ekonomi atau disebut juga sebagai angkatan kerja (sedang bekerja atau mencari pekerjaan) terhadap keseluruhan penduduk yang tergolong dalam kriteria usia kerja. Dalam segi kategori pemuda, TPAK ialah proporsi dari pemuda (penduduk dengan usia 16-30 tahun) yang terdapat dalam rangkaian kegiatan ekonomi tersebut (Meyvi, dkk. 2020).

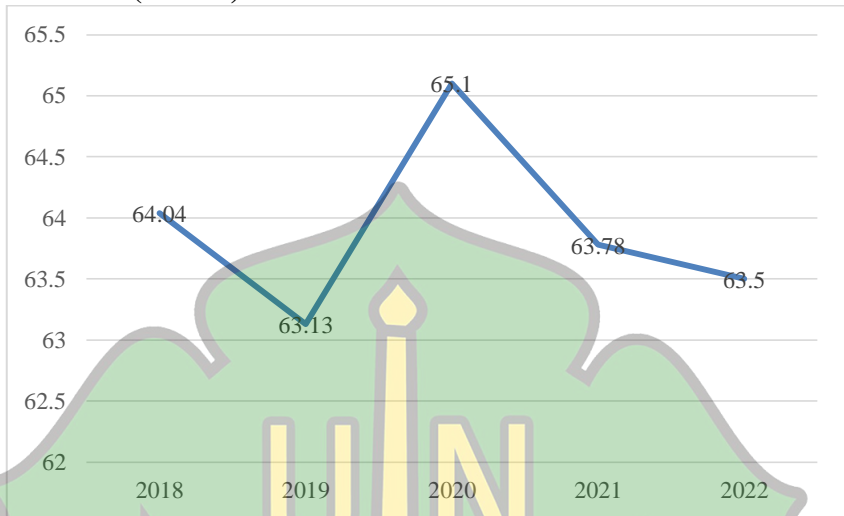
Tingkat partisipasi angkatan kerja mampu mempengaruhi tingkatan pengangguran, dimana kondisi wadah penampung angkatan kerja dapat semakin lebih baik bila adanya peningkatan tersebut yang diiringi dengan meningkatnya laju partisipasi penduduk yang telah bekerja. Akan tetapi bila wadah penampung lapangan kerja tersebut kurang tentu tidak akan baik, hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran yang ada sebab dikarenakan minimnya ketersediaan lapangan kerja untuk dapat menampung banyaknya angkatan kerja tersebut (Frida, 2021).

Dasar tujuan dari seseorang bekerja ialah mendapatkan pendapatan yang kemudian dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhannya atau keluarganya sehari-hari. Perlunya peran pemerintah dalam berupaya melakukan pemecahan masalah terhadap permasalahan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), masalah ketenagakerjaan ini dapat merujuk pada masalah baru yaitu kemiskinan. Apabila disuatu wilayah mempunyai tingkat penduduk yang berstatus tidak bekerja dalam jumlah yang tinggi, maka dapat berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk kategori miskin (Meyvi, dkk. 2020).

Kondisi dan permasalahan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga dirasakan di Provinsi Aceh, dimana angka angkatan kerja di Kabupaten atau Kota Provinsi Aceh masih tergolong tinggi di bandingkan jumlah penduduk yang telah bekerja. Dengan banyaknya tingkat angkatan kerja yang lebih tinggi dibanding dari angka jumlah penduduk yang telah bekerja dapat menunjukkan bahwa tingkat tenaga kerja di Provinsi Aceh masih terbilang banyak yang belum terserap, hal ini dapat berdampak pada angka pengangguran yang meningkat karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia (BPS Aceh). Untuk menjelaskan kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang terjadi di Provinsi Aceh dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.2 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022



Data : BPS Provinsi Aceh (2023)

Dari grafik di atas, diketahui bahwa adanya perubahan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2018 sebesar 64,04%, kemudian di tahun 2019 turun sebesar 63,13% dan tahun 2020 meningkat tinggi menjadi 65,10%, pada tahun tersebut banyak terjadinya pembatasan sosial akibat Covid-19 sehingga berdampak pada TPAK, dimana banyak angkatan kerja kesulitan memperoleh pekerjaan karena adanya pembatasan tenaga kerja pada saat itu. Kemudian ditahun berikutnya yaitu tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan hingga sebesar 63,5%, hal ini dapat terjadi karena adanya pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Tingkat upah yang relatif tinggi mampu mendorong rasa semangat baik dalam kegiatan kerja ataupun produktivitas tenaga kerjanya, maka biasanya akan diperoleh hasil produktifitas yang baik. Upah minimum merupakan standar angka minimum yang digunakan atau diterapkan pada para pengusaha atau pelaku industri dan sejenisnya dalam pendistribusian pemberian upah pada tenaga kerjanya di lingkungan usaha atau pekerjaan. Upah minimum menjadi salah satu aspek yang berpengaruh pada tingkat kesempatan kerja dan masalah pengangguran. Tujuan utama dari ditetapkannya aturan upah minimum ialah untuk memncukupi standar hidup layak atau minimumnya yang diperuntukkan atau diarahkan pada kesehatan, efisiensinya, dan kesejahteraan pekerja sistem penerapan upah minimum ini biasanya terdapat bagi negara yang memiliki kondisi penduduk yang relatif tinggi seperti negara Indonesia (Firdayanti dan Yacoub, 2019).

Tingkat upah yang cenderung tinggi mampu memicu tinggi minat para pencari kerja pada suatu perusahaan agar memperoleh upah yang menjamin. Namun kondisi ini dapat pula berbalik pada pihak perusahaan, dimana ketika upah minimum naik bisa mengakibatkan perusahaan memiliki pilihan terhadap penggunaan tenaga kerja atau memanfaatkan teknologi mesin yang ada, yang produktifitas kegiatan kerjanya mampu dipermudah oleh mesin. Ketika teknologi telah lebih bersaing maka hal ini dapat mempengaruhi pengangguran

karena ketersediaan lapangan kerja telah mampu digantikan teknologi mesin (Firdayanti dan Yacoub, 2019).

Tingkat upah minimum regional Provinsi Aceh pada setiap tahunnya selalu cenderung mengalami peningkatan, dimana hal tersebut tentu dapat mempengaruhi angka pengangguran, untuk menjelaskan kondisi upah minimum regional (UMR) yang terjadi di Provinsi Aceh dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 1.3 Grafik Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Aceh Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Grafik tersebut menunjukkan bagaimana kondisi upah minimum regional (UMR) di Provinsi Aceh, yang mana pada setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp2.700.000, kemudian tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.916.810 lalu di tahun 2020 dan 2021 kenaikan sebesar Rp3.165.031 dan Rp3.165.031, serta tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.166.460.

naik menjadi Rp3.165.030 dan kemudian naik lagi di tahun berikutnya yaitu tahun 2022 sebesar Rp3.166.460. Mengacu pada Badan Pusat Statistik, penghitungan kenaikan UMR yang paling ideal adalah dari inflasi, IHK dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan UMR dapat terjadi dikarenakan semakin tingginya produktivitas, meningkatnya inflasi, pemerintah akan menaikkan UMR untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup dan mempertahankan daya beli tenaga kerja.

Menurut penelitian sebelumnya, yaitu oleh Kartika dan Muslim (2020) menyatakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja berpendidikan tinggi rata-rata dan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Menurutnya pemerintah harus membuat kebijakan penyediaan lapangan pekerjaan untuk yang menyelesaikan pendidikan yang tinggi sehingga dapat dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik maka mampu meredam angka pengangguran yang meningkat. Sedangkan menurut penelitian Firdayanti dan Yacoub (2019) dengan penelitian yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017 mengatakan inflasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan berdampak negatif terhadap pengangguran, lalu pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh yang tidak

signifikan dan berdampak positif terhadap pengangguran dan upah minimum menunjukkan pengaruh yang signifikan dan berdampak positif terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Namun hal ini berbanding dengan penelitian oleh Gufron (2020) dimana upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dan didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulatsih (2013), Mulatsih menyatakan bahwa kepadatan penduduk dan upah minimum terhadap pengangguran yaitu tidak signifikan, pengangguran terjadi dikaitkan dengan padatnya penduduk bukanlah faktor besar yang mempengaruhi pengangguran. Selama ini padatnya penduduk selalu saja menjadi pembicaraan atas penyebabnya pengangguran yang tinggi di Indonesia lantaran banyaknya permintaan akan pekerjaan tidak didukung oleh banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia, dan juga upah atau gaji bukan faktor utama masyarakat Indonesia tidak mau memilih lapangan pekerjaan tersebut sehingga terjadi pengangguran.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik dan bermaksud untuk mengkaji penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap pengangguran di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum regional (UMR) terhadap pengangguran di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan upah minimum regional (UMR) terhadap pengangguran di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang diarahkan untuk materi dan pembahasannya dapat tepat sasaran dan mampu memudahkan dalam melakukan kegiatan penelitian. Tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap pengangguran di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum regional (UMR) terhadap pengangguran di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan upah minimum regional (UMR) terhadap pengangguran di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman, bahan referensi atau acuan melengkapi kajian yang berkaitan tentang pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum regional/provinsi terhadap pengangguran di Provinsi Aceh.
2. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi:
 - a. Mahasiswa, diharapkan bisa menambahkan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan pemahaman terhadap persoalan pengangguran di Provinsi Aceh.
 - b. Bagi pihak investor atau pelaku bisnis, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap penyerapan tenaga kerja guna mengurangi persoalan pengangguran di Provinsi Aceh.
 - c. Masyarakat, diharapkan mampu menambah wawasan dan membantu memahami permasalahan pengangguran dan solusinya di Provinsi Aceh.
3. Hasil penelitian diharapkan ini dapat menjadi bahan acuan atau masukan bagi pihak pemerintahan dan pemilik lapangan kerja, diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam berpartisipasi mengatasi dan menampung para pekerja untuk meminimalisir masalah pengangguran di Provinsi Aceh.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk dapat mempermudah pemahaman dari awal sampai akhir maka penulis menerangkan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, berisi tentang pembahasan mengenai pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR).

BAB III METODE PENELITIAN, yang menerangkan tentang jenis penelitian, jenis data dan sumber data, definisi dan operasional variabel, metode dan teknik analisis data, pengujian hipotesis, uji T dan uji F.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang hasil penelitian, pembagian pembahasan sesuai dengan pendekatan, keadaan penelitian dan tujuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, sebagai penutup yang mana pada bab ini penulis mencoba untuk menerangkan kesimpulan yang ditemukan dalam pengujian hipotesis dan penerangan singkat dari hasil yang ditemukan, dan saran yang bisa digunakan untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengangguran

2.1.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (BPS 2022).

Pengangguran atau tuna karya merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya (Naf'an, 2014 : 132).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan setiap angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang berusaha mencari pekerjaan akan tetapi

tidak kunjung mendapatkannya. Pada kejadian ini umumnya terjadi disebabkan kemampuan pelamar kerja tidak sesuai dengan kebutuhan yang dicari pada pasar tenaga kerja dan juga dikarenakan jumlah pencari kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja sehingga lapangan kerja hanya bisa menampung sebahagian kecil dari para pelamar kerja saja sedangkan pelamar kerja yang tidak terpilih lainnya hanya dapat berusaha mencari kerja kepada lapangan kerja yang lainnya.

2.1.2 Jenis – Jenis Pengangguran

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
- b. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
- c. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai

pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapatkan pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal (Falianty, 2019 : 41).

Namun menurut Sukirno (2021 : 330) mengatakan bahwa berdasarkan ciri-cirinya, dibagi kepada empat jenis juga, yaitu:

- a. **Pengangguran Terbuka.** Pengangguran ini ada dikarenakan bertambahnya lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian yaitu semakin meningkat jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan sehingga para pencari kerja menganggur di sepanjang waktu, pengangguran ini dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka juga merupakan akibat dari meningkatnya kemajuan teknologi sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja dan juga akibat dari merosotnya pertumbuhan suatu industri.
- b. **Pengangguran Tersembunyi.** Pengangguran ini sering ada di sektor pertanian dan jasa. Setiap negara berkembang sering ditemui jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan dapat digolongkan sebagai pengangguran tersembunyi.

c. Pengangguran Bermusim. Pengangguran ini terdapat pada sektor pertanian dan perikanan. Penyebab terjadinya pengangguran tersebut umumnya diakibatkan oleh faktor alam seperti musim hujan yang menyebabkan para petani dan nelayan tidak bisa melakukan pekerjaan mereka. Apabila para petani dan nelayan tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini disebut sebagai pengangguran bermusim.

d. Setengah Menganggur. Pada negara berkembang migrasi dari desa ke kota meningkat sangat pesat. Sehingga akibatnya tidak semua orang yang migrasi ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu dan ada juga yang tidak menganggur tetapi tidak juga bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka jauh lebih sedikit dari jam kerja normal. Pekerja ini hanya bekerja satu sampai dua hari dalam seminggu, atau satu sampai empat jam dalam sehari. Pekerja yang memiliki masa kerja seperti ini disebut sebagai setengah menganggur.

Sementara itu jika dilihat berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dapat dibedakan menjadi empat macam (Falianty, 2019 : 42), yaitu sebagai berikut:

a. Pengangguran Normal/Friksional (*Frictional Unemployment*)

Pengangguran ini terjadi akibat adanya perubahan yang konstan dalam perekonomian, dimana terjadi perpindahan dalam pekerjaan untuk menyesuaikan tentara pekerjaan dengan tenaga kerja. Tenaga kerja baru berusaha mencari pekerjaan, tenaga kerja lama berusaha mencari pekerjaan baru. Dengan kata lain, pengangguran tipe ini adalah pengangguran yang sedang mencari pekerjaan, disebut juga pengangguran sukarela karena mereka baru akan memasuki lapangan kerja dan yang sudah bekerja keluar dari pekerjaannya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.

b. Pengangguran Struktural (*Structural Unemployment*)

Pengangguran seperti ini terjadi karena adanya ketidak sesuaian antara cara struktur tenaga kerja berdasarkan pendidikan, keterampilan, industri, dan lainnya dengan kebutuhan kerja. Pengangguran ini dapat bersifat alami karena adanya kebutuhan tenaga kerja dengan spesifikasi pendidikan dan keahlian tertentu atau juga karena kebijakan pemerintah.

c. Pengangguran Siklikal (*Cyclical Unemployment*)

Pengangguran siklikal merupakan bertambahnya permintaan agregat akan mengakibatkan terdorong

pengusaha untuk melakukan kenaikan atas produksinya. Ketika pekerja baru bertambah banyak maka akan mengurangnya pengangguran, tetapi pada sisi lain permintaan agregat menurun yang dikarenakan oleh kemundurannya harga-harga komoditas dan perubahan pada output perekonomian. Pengangguran seperti ini dapat dikatakan sebagai pengangguran terpaksa karena banyak tenaga kerja yang ingin bekerja namun lapangan pekerjaan tidak tersedia.

d. Pengangguran teknologi (*Technology Unemployment*)

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin dan revolusi dari perkembangan zaman, dimana pergantian tenaga manusia oleh teknologi berupa mesin-mesin dan bahan kimia seperti mesin jahit, mesin bajak sawah dan lain sebagainya.

2.1.3 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pengangguran

Kaufman dan Hotchkiss (1999) dalam dalam pujoalwanto (2014:114), mengidentifikasi penyebab pengangguran sebagai berikut:

1) Proses mencari kerja

Munculnya angkatan kerja baru akan menimbulkan persaingan yang ketat pada proses mencari kerja. Dalam proses mencari kerja terdapat hambatan yang disebabkan keinginan pekerja untuk berpindah ke pekerjaan serta tidak sempurnanya informasi tentang besarnya tingkat upah yang layak diterima.

2) Kekakuan upah

Tingkat upah yang tidak fleksibel menyebabkan terjadinya pengangguran. Penurunan produksi turut menurunkan permintaan terhadap tenaga kerja. Akibatnya, akan terjadi penurunan besar upah yang ditentukan. Dengan upah yang kaku, dalam jangka pendek, tingkat upah akan mengalami peningkatan, hal ini meningkatkan penawaran tenaga kerja sebagai inflasi dari adanya tingkat pengangguran akibat kekakuan upah tersebut.

3) Efisiensi upah

Efisiensi yang terjadi pada fungsi tingkat upah terjadi karena semakin tinggi perusahaan membayar upah maka akan semakin keras usaha pekerja untuk bekerja. Hal ini memberikan konsekuensi jika perusahaan memilih membayar lebih pada tenaga kerja yang memiliki efisiensi yang lebih tinggi maka akan terjadi

pengangguran akibat dari persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Naf'an (2014:132-133) menjadi pengangguran bukanlah keinginan seseorang namun keadaanlah yang terkadang memaksa mereka. berikut beberapa penyebab terjadinya pengangguran yaitu sebagai berikut:

1. Penduduk relatif banyak menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi sedangkan kesempatan kerja atau lapangan kerja relatif rendah.

Jumlah penduduk yang cukup tinggi tetapi tidak diimbangi dengan lapangan kerja maka jumlah angkatan kerja tidak semua tertampung dalam dunia kerja.

2. Pendidikan dan keterampilan yang rendah pendidikan dan keterampilan yang rendah tidak dibutuhkan oleh pihak badan usaha karena dengan pendidikan yang rendah dan keterampilan yang tidak mencukupi akan mempengaruhi produktivitas kerja dan hasil produksi menjadi tidak maksimal.

3. Teknologi yang semakin maju yang belum terimbangi oleh kemampuan manusia

Teknologi dan kemampuan yang tinggi begitu cepat tidak diimbangi dengan kemampuan manusia untuk

menguasainya maka banyak badan usaha hanya menerima yang mampu menguasai teknologi tersebut. bagi yang tidak menguasai teknologi tersebut maka akan tersingkir dalam persaingan kerja.

4. Pengusaha yang selalu ingin mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan seperti penerapan rasionalisasi.

Pengusaha hanya menerapkan berpikir rasionalis sehingga tenaga kerja dipaksa untuk bekerja seoptimal mungkin untuk mengejar target. Apabila tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan target maka tenaga kerja tersebut tidak diperlukan lagi.

5. Adanya lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim
Pekerjaan yang dipengaruhi musim dapat menimbulkan pengangguran seperti pertanian dan perkebunan, dimana setelah masa menanam selesai maka banyak tenaga kerja tinggal menunggu hasilnya. Untuk menunggu hasilnya maka kebanyakan diantara mereka yang menganggur dan akan bekerja kembali apabila nanti musim panen telah tiba.

2.1.4 Dampak Pengangguran

Untuk mengetahui besarnya dampak pengangguran maka pengangguran dikelompokkan menjadi dua aspek ekonomi, yaitu sebagai berikut:

- a. Dampak pengangguran terhadap Perekonomian di suatu negara

Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan terus meningkat. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- 1) Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat sama orang yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
- 2) Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari

masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.

- 3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian an tidak merangsang kalangan investor atau pengusaha untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru, dengan demikian, tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu atau melambat.

b. Dampak Pengangguran terhadap Perorangan dan Masyarakat

Berikut beberapa dampak dari pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat pada umumnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian;
- 2) Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan;
- 3) Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik (Falianty, 2019).

Sedangkan menurut Franita (2016) beberapa akibat yang akan tumbuh dikarenakan pengangguran ialah sebagai berikut:

1. Dalam bidang ekonomi pengangguran akan semakin menumbuhkan kemiskinan. Disebabkan banyak yang menganggur sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan perekonomian mereka. Justru kebutuhan dalam hidup terus berjalan. Hal tersebut akan menjadikan mereka tidak dapat mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup para pengangguran.
2. Dalam bidang mental, jika pengangguran meningkat maka kepercayaan diri akan berkurang, terjadilah keputusan dan menjadikan mereka depresi atau stres.
3. Dalam bidang keamanan, para pengangguran melakukan tindakan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya seperti merampok, mencuri, menjual narkoba, penipuan dan tindakan keji lainnya.
4. Akibat dari pengangguran juga dapat meningkatkan pekerja seks dikarenakan merasa putus asa setelah terlalu lelah melamar pekerjaan, perbuatan ini biasanya digeluti oleh kalangan muda demi memenuhi kebutuhannya.

5. Dalam bidang sosial, akibat dari banyaknya pengangguran sehingga meningkatlah kemiskinan, kemudian muncul pengemis, gelandangan, dan juga pengamen. Yang mana kemungkinan besar akan mempengaruhi tingkat criminal, dikarenakan betapa beratnya mencari pekerjaan, sehingga akan banyak yang melakukan tindakan kejahatan berupa mencuri, merampok dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
6. Dalam bidang politik, akan meningkatnya demonstrasi yang terjadi. Ini akan menjadikan dunia politik tidak seimbang, biasanya demonstran berasal dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan diakibatkan dari meningkatnya pengangguran.

Untuk mencegah pengangguran terdapat peninjauan-peninjauan ekonomi. Pada keadaan ini terdapat tiga peninjauan yang sangat penting, yaitu:

- 1). Mengadakan lapangan pekerjaan,
- 2). Mengembangkan tingkat kemakmuran masyarakat,
- 3). Mengatur ulang pemberian pendapatan pengangguran yang makin meningkat.

2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

2.2.1 Pengertian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut S. Mulyadi (2014:72) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat didefinisikan sebagai ukuran proporsi populasi manusia kerja suatu negara atau mencari pekerjaan. Ini memberikan indikasi ukuran pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa, relatif terhadap populasi pada usia kerja. TPAK menghitung jumlah orang dalam angkatan kerja sebagai presentase 20 dari penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah jumlah dari orang yang bekerja dan tidak bekerja, sedangkan populasi penduduk usia kerja adalah penduduk di atas usia kerja biasanya 15 tahun keatas (Resmiati. 2018).

Konsep tingkat partisipasi angkatan kerja menurut BPS adalah presentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Angka ini mengindikasikan besarnya presentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*Labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

2.2.2 Konsep Ketenagakerjaan

Menurut Mulyadi S. (2014 : 71-73) beberapa pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, yaitu:

1. Tenaga Kerja (*Manpower*)

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau Jumlah keseluruhan penduduk dalam dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

2. Angkatan Kerja (*Labor Force*)

Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif, yaitu produksi barang dan jasa.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*labor Force participation Rate*)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut.

$$TPAK = \frac{\text{angkatan kerja}}{\text{tenaga kerja}} \times 100$$

4. Tingkat Pengangguran (*Unemployment Rate*)

Tingkat pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian menganggur di sini adalah aktif mencari pekerjaan.

$$P = \frac{\text{jumlah orang yang mencari pekerjaan}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

5. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Pengangguran terbuka atau pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.

$$TPT = \frac{\text{keseluruhan angkatan kerja}}{\text{angkatan kerja}} \times 100$$

6. Setengah Menganggur (*underemployment*)

Setengah menganggur (*underemployment*) adalah perbedaan antara jumlah pekerjaan yang betul dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang secara normal mampu dan ingin dikerjakannya.

7. Setengah Menganggur yang Kentara (*Visible Unemployment*)

Setengah menganggur yang kentara (*visible unemployment*) adalah jika seseorang bekerja tidak tetap

(*part time*) di kembang laut luar keinginannya sendiri, atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya.

8. Setengah Menganggur yang Tidak Kentara (*Invisible Unemployment*)

Setengah menganggur yang tidak kentara (*invisible unemployment*) adalah jika seseorang bekerja secara penuh (*full time*) tetapi pekerjaannya dianggap tidak mencukupi, karena pendapatannya yang terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk mengembangkan seluruh keahliannya.

9. Pengangguran Tidak Kentara (*Disguised Unemployment*)

Dalam angkatan kerja mereka dimasukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya mereka adalah penganggur. Jika dilihat dari segi produktivitasnya. Misalnya: pekerjaan yang seharusnya dikerjakan dua orang, tetapi dikerjakan oleh tiga orang, sehingga satu orang tersebut merupakan *disguised unemployment*.

10. Pengangguran Friksional (*Unemployment Frictional*)

Pengangguran friksional (*unemployment frictional*) adalah pengangguran yang terjadi akibat pindahnya seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan, akibatnya harus mempunyai tenggang waktu dan

berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain tersebut.

11. Pengangguran Struktural (*Unemployment structural*)

Pengangguran struktural (*unemployment structural*) adalah pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan antar struktur para pencari kerja sehubungan dengan keterampilan, bidang keahlian, maupun daerah lokasinya dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi.

2.2.3 Teori Ketenagakerjaan

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja (*demand of labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labor*), pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa: (a) lebih besarnya penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (adanya *excess supply of labor*), dan (b) lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya *excess demand for labor*).

Ada dua teori penting perlu dikemukakan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan. Pertama adalah teori Lewis (1959) dalam Rivai, dkk. (2014) yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan

kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain.

Dua struktur di dalam perekonomian negara berkembang yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten latar belakang. Menurut Lewis sektor subsisten terbelakang tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer koran.

Sektor subsisten belakang mempunyai kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah relatif lebih murah daripada sektor *kapitalisme modern*. Lebih murah biaya upah pekerja asal pedesaan akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha di perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran pekerja di sektor subsisten terbelakang akan diserap.

Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industri modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan atau ketimpangan tingkat pendapatan antara perkotaan dan pedesaan.

Menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi, sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan dengan asumsi bahwa perpindahan

pekerja dari sektor subsisten ke sektor kapitalisme modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah terjadi "terlalu banyak".

Teori kedua adalah teori Fei-Ranis (1961) dalam Rivai, dkk. (2014) yang berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri sebagai berikut: kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurut Fei-Ranis ada tiga tahap pembangunan ekonomi dan kondisi kelebihan buruh. *Pertama*, di mana para penganggur semu (yang tidak menambah *output* pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. *Kedua*, tahap di mana pekerja pertanian menambah *output* tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri. *Ketiga*, tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan *output* lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dalam hal ini kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus-menerus sejalan dengan bertambahnya *output* dan perluasan usahanya (Rivai, dkk. 2014).

2.2.4 Produktifitas Pekerja

Peningkatan kualitas pekerja yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan rata-rata yang semakin baik, memberi dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja begitu pula dengan upaya peningkatan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja yang disertai dengan penerapan teknologi yang sesuai, berdampak pula terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Tingkat produktivitas pekerja digambarkan dari rasio PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap jumlah pekerja. Secara nasional produktivitas sektor umum (termasuk minyak bumi dan gas/migas) lebih besar daripada produktivitas sektor non-migas, ini berarti nilai *output* yang dihasilkan oleh sektor Migas lebih tinggi dibandingkan dengan sektor non-migas.

Perbedaan tersebut akan semakin tampak jika melihat tingkat produktivitas menurut provinsi. Daerah-daerah yang merupakan penghasil Migas terbesar akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi, misalnya Provinsi Aceh, Riau, Kalimantan Timur dan Irian Jaya. Di samping itu perbedaan produktivitas pekerja yang relatif tinggi juga masih dijumpai pada provinsi-provinsi yang sarat dengan berbagai kegiatan ekonomi yang menggunakan alat-alat mekanis dan otomatis. Sebaliknya produktivitas pekerja yang relatif rendah ditemui di provinsi-provinsi dengan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan padat karya (Rivai, dkk. 2014).

2.3 Upah Minimum Regional (UMR)

2.3.1 Pengertian Upah Minimum

Upah diartikan sebagai pembayaran ke atas jasa-jasa fisik, maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha (Sukirno 2013;351). menurut Rivai (2014) upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Besarnya upah dapat berubah-ubah, tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap. Konsep upah biasanya dikaitkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas.

Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/ gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya (BPS 2022).

Dewan penelitian pengupahan nasional mendefinisikan upah sebagai suatu penerimaan imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada penerima kerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan serta berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi (Yusuf, 2015;248). Pemerintah di banyak negara selalu berusaha untuk melindungi pekerja dengan menetapkan

undang-undang suatu tingkat upah minimum yang dibayar oleh perusahaan kepada pekerjanya yang dikenal sebagai upah minimum regional atau UMR, tingkat upah minimum regional berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain dan ditentukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan dan tingkat perkembangan perusahaan (Suparmoko dan Sofilda, 2014:182).

2.3.2 Penggolongan Upah

Menurut Badan Pusat Statistik upah minimum regional merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pegawainya karyawannya atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Menurut Sukirno (2013:351) upah terbagi menjadi dua yaitu upah riil dan upah uang. Upah uang adalah jumlah yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental dan fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

Upah sistem waktu merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya upah sistem waktu hanya didasarkan kepada

lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya, upah sistem hasil diterapkan atas kesatuan unit dan dibayar berdasarkan hasil banyaknya yang dikerjakan. Upah sistem borongan adalah cara pengupahan yang didasarkan atas volume pekerja dan lama pengerjaannya (Rivai, 2014:554).

2.3.3 Teori Pembentukan Harga Upah

Ada beberapa teori yang harus diperhatikan sebagai teori dasar dalam pembentukan harga upah tenaga kerja yaitu sebagai berikut:

1. **Teori Upah Norminal (David Ricardo)**

Menurut Teori ini upah diterapkan dengan melihat biaya yang diperlukan untuk melanjutkan kehidupan tenaga kerja. Teori ini menjelaskan bahwa sejumlah uang yang diterima tenaga kerja sebagai upah itu merupakan kewajaran demikian besarnya karena memang hanya demikian kemampuan perusahaan.

2. **Teori Upah Besi (Ferdinand Lassalle)**

Menurut teori ini, pembayaran upah berdasarkan teori upah minimal hanya memenangkan pengusaha sehingga pekerja berada dalam posisi yang sulit karena upah telah ditetapkan oleh pengusaha. Berhubungan dengan kondisi tersebut, teori ini dikenal sebagai "Teori Upah Besi". Kemudian Lasalle menganjurkan untuk

menentang kebijakan Para produsen terhadap upah dengan membentuk Serikat Pekerja.

3. Teori Dana Upah (John Stuart Mill)

Menurut teori ini upah yang diterima para pekerja itu sebenarnya tergantung pada besar kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat. Maka Upah yang akan diterima pekerja juga besar sebaliknya jika jumlah dana tersebut berkurang akan mendorong penurunan upah yang akan diterima oleh pekerja.

4. Teori Upah Etika

Teori ini mempersoalkan Seberapa jauh upah yang diterima pekerja mampu mencukupi segala keperluan hidupnya beserta keluarganya. Oleh karena itu, teori ini menganjurkan untuk menyediakan dana khusus oleh pengusaha atau negara yang disebut dana anak-anak untuk menunjang keperluan hidup buruh yang besar tanggungannya (Sari, 2015).

2.3.4 Faktor-Faktor yang Menimbulkan Perbedaan Upah

Menurut Sukirno (2013:364-366) faktor-faktor yang penting menjadi sumber dari perbedaan upah diantara para pekerja di dalam suatu jenis kerja tertentu dan diantara berbagai golongan pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Peranan permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam suatu jenis pekerjaan sangat besar dalam penentuan upah di pekerjaan tersebut. Apabila terdapat penawaran tenaga kerja dalam suatu pekerjaan yang lebih besar daripada permintaan tenaga kerja maka upah cenderung untuk mencapai tingkat yang rendah.

2. Perbedaan Corak Pekerjaan

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan, dimana ada di antara pekerjaan tersebut mudah dilakukan dan ada pula yang harus mengeluarkan tenaga fisik yang besar dengan resiko yang tinggi. Perbedaan jenis pekerjaan tersebut yang akan menimbulkan perbedaan upah.

3. Perbedaan Kemampuan, Keahlian dan Pendidikan

Dalam perekonomian yang semakin maju kegiatan-kegiatan ekonomi semakin memerlukan tenaga kerja yang mampu menjalankan kegiatan perekonomian secara modern. Setiap jenis pekerjaan memerlukan kemampuan, keterampilan dan keahlian yang berbeda, semakin suatu pekerjaan akan menyebabkan tenaga kerja yang terdidik diperlukan. Kekurangan penawaran tenaga kerja terdidik menyebabkan upah yang diperolehnya lebih tinggi karena pendidikannya

meningkatkan kemampuan kerjanya sehingga menaikkan produktivitas.

4. Pertimbangan Bukan Keuangan

Banyak faktor yang bukan keuangan mempunyai peranan yang menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih pekerjaan. Seseorang akan bersedia menerima upah yang lebih rendah apabila pertimbangan bukan keuangan itu sesuai dengan keinginannya. Namun sebaliknya, apabila pertimbangan bukan keuangan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, orang tersebut akan menuntut upah yang lebih tinggi sebelum menerima tawaran pekerjaan.

5. Mobilitas Tenaga Kerja

Upah dari sesuatu pekerjaan di setiap wilayah tidak selalu sama. Hal tersebut menyebabkan tenaga kerja berpindah ke tempat yang memberikan upah yang lebih tinggi. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja menimbulkan perbedaan upah dan dua faktor yang menimbulkan ketidaksempurnaan tersebut adalah faktor geografis dan faktor institusional.

2.4 Pengaruh Antar Variabel

2.4.1 Pengaruh Tingkat Partipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pengangguran

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan cepatnya laju pertumbuhan angkatan kerja terutama dikalangan tenaga kerja muda. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja, maka secara otomatis jumlah angkatan kerja akan bertambah. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja semakin baik. Bila peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja. Jika hal sebaliknya terjadi yakni bertambahnya tingkat partisipasi angkatan kerja tidak diiringi dengan menurunnya partisipasi penduduk yang mendapatkan pekerjaan, maka ini pertanda bahwa pemicu tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja adalah meningkatnya penduduk yang mencari pekerjaan dan kurangnya lapangan kerja. Dengan kata lain hal tersebut akan memicu bertambahnya jumlah pengangguran yang disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan dalam menampung angkatan kerja (Mulyadi, 2014).

Menurut penelitian Kartika dan Muslim (2020) menyatakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Kemudian menurut Naf'an (2014) terdapatnya penduduk usia matang yang tinggi mampu menciptakan kondisi banyaknya angkatan tenaga kerja yang tidak

tertampung dalam dunia kerja karena ketersediaan lapangan kerja yang lebih rendah dari keberadaan tenaga kerja tersebut maka dapat mengakibatkan meningkatnya pengangguran di suatu wilayah atau daerah.

2.4.2 Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Pengangguran

Menurut Sukirno (2012) teori penawaran neoklasik upah menyesuaikan diri secara seketika untuk menjamin output secara beradab pada kondisi *full employment* tetapi output tidak selalu pada tingkat *full employment* dan kurva Philips menyatakan bahwa upah menyesuaikan diri dengan lamban sebagai respon terhadap perubahan dalam pengangguran. Pertanyaan utama pada teori penawaran agregat adalah mengapa upah nominal lamban menyesuaikan diri terhadap pergeseran dalam permintaan dengan kata lain mengapa upah begitu kaku upah, tidak fleksibel atau penyesuaian upah terjadi perlahan-lahan, ketika upah bergerak secara lamban sepanjang waktu alih-alih fleksibel dengan cepat dan penuh sedemikian rupa untuk menjamin *full employment* selalu terjadi setiap saat.

Hubungan upah tenaga kerja, diilustrasikan dalam upah periode selanjutnya. Katakanlah upah yang berlaku pada periode sekarang namun dengan menyesuaikan tingkat Tenaga Kerja dan ekspektasi inflasi. Pada saat *full employment* upah

periode berikutnya sama dengan upah periode sekarang ditambah penyesuaian ekspektasi inflasi. Jika tenaga kerja berada di atas tingkat periode berikutnya akan naik melebihi upah periode sekarang. Tingkat perubahan upah sebagai respon terhadap perubahan tenaga kerja tergantung pada parameternya. Jika besar maka pengangguran akan mempunyai pengaruh besar terhadap upah dan garis akan curam.

Menurut penelitian Firdayanti dan Yacoub (2019) menyatakan Pengaruh upah minimum menunjukkan pengaruh yang signifikan dan berdampak positif terhadap pengangguran. Penelitian Izzah (2015) mengatakan bahwa upah minimum berpengaruh pada pengangguran, penelitiannya pun menjelaskan untuk menurunkan tingkat pengangguran maka sebaiknya upah minimum provinsi besarnya selalu disesuaikan dengan standar hidup yang layak. Pemerintah harus berusaha untuk menyesuaikan upah minimum provinsi agar sesuai dengan standar hidup yang layak.

2.6 Penelitian Terkait

Penelitian terkait merupakan hal yang sangat mendukung suatu penelitian karya ilmiah. Yang mana penelitian terkait itu sendiri dapat memberikan gambaran akan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti. Beberapa penelitian terdahulu tentang “Pengaruh Tingkat PartisipasiAngkata Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadapTingkat

Pengangguran” telah banyak di telaah. Diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Muslim (2020) tentang 'Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran di Indonesia' menunjukkan hasil bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpendidikan tinggi dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.
2. Selanjutnya penelitian oleh Tusianti dan Septiyanto (2022) tentang 'Analisis Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat' menunjukkan hasil bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), upah minimum Kabupaten (UMK) dan presentase tenaga kerja sektor industri berpengaruh pada pengangguran di Provinsi Jawa Barat sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Barat.
3. Berikutnya penelitian oleh Nohe dkk (2022) Tentang Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan IPM terhadap tingkat pengangguran Terbuka Menggunakan Regresi, yang menunjukkan hasil bahwa Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka sedangkan Indeks pembangunan manusia tidak

berpengaruh secara Signifikan terhadap Tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Barat pada tahun 2020.

4. Kemudian Penelitian oleh Firdayanti dan Yaqoub (2019) tentang Pengaruh Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Pengangguran di Kabupaten atau Kota Provinsi Kalimantan Barat, menunjukkan hasil bahwa pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan dan berdampak positif terhadap pengangguran kemudian upah minimum menunjukkan hasil pengaruh yang signifikan serta berdampak positif terhadap pengangguran.
5. Penelitian oleh Mulatsih (2013) tentang pengaruh Tingkat Kepadatan Penduduk dan Upah Minimum terhadap Pengangguran di Indonesia tahun 2013 di mana menunjukkan hasil variabel kepadatan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengangguran dan variabel upah minimum juga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengangguran.
6. Kemudian penelitian oleh Nasrudin dkk (2017) yang meneliti tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran dalam Kurung Studi Kasus Kabupaten Aceh Utara menunjukkan hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi secara

bersama-sama mampu mempengaruhi tingkat pengangguran, sedangkan angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

7. Selanjutnya penelitian oleh Pramudjasi dkk (2019) yang meneliti tentang Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendidikan Serta Upah terhadap Pengangguran di Kabupaten Paser menunjukkan hasil bahwasanya jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, lalu pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran dan upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.
8. Kemudian penelitian oleh Anggoro (2015) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Surabaya yang menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tingkat partisipasi angkatan kerja sama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kota Surabaya.
9. Berikutnya penelitian oleh Saadah dan Ardyan (2016) tentang Analisis Pengaruh Upah Minimum Pekerja dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Tingkat Pengangguran di Surabaya, hasil menunjukkan bahwa upah minimum pekerja memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja kemudian jumlah

penduduk miskin memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran.

10. Penelitian oleh Syahputra dan Nurhayati (2019) yang meneliti tentang Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pengeluaran Pemerintah Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi-Provinsi Sumatera, menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka sementara variabel pengeluaran pemerintah dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Namun terdapat beberapa perbedaan baik dalam hal variabel, lokasi dan tahun penelitian dan metode dari penelitian-penelitian yang diuraikan diatas dengan penelitian ini. Adapun penelitian terkait yang menyangkut dengan persamaan dan perbedaan pada penelitian ini, seperti tersebut pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Kartika dan Muslim, 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran di Indonesia	Penelitian kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk time series. Pengujian hipotesis menggunakan uji analisis regresi linear berganda.	Pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja berpendidikan tinggi (TPAK) rata-rata dan upah minimum provinsi (UMP) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran	<p>Persamaannya adalah sama-sama menggunakan Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Upah Minimum Regional dan Pengangguran.</p> <p>Perbedaan terletak pada variabel independennya terdapat pertumbuhan ekonomi dan inflasi, perbedaan lokasi dan tahun penelitian serta bentuk data sekunder yang dipilih</p>
2.	Tusianti dan Septiyanto, 2020. Analisis Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat	Penelitian kuantitatif, Metode yang digunakan adalah metode regresi spasial dengan data panel. Model yang terpilih adalah <i>fixed effects</i> <i>spatial autoregressive</i> model.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), upah minimum Kabupaten (UMK) dan presentase tenaga kerja sektor industri berpengaruh pada pengangguran sedangkan pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.	<p>Persamaannya adalah sama-sama menggunakan Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Upah Minimum Regional dan Pengangguran.</p> <p>Perbedaan terletak pada variabel independen yang terdapat variabel persentase tenaga kerja sektor industri, kemudian perbedaan lokasi dan tahun penelitian</p>

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
3.	Nohe Dkk, 2022. Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan IPM terhadap tingkat pengangguran Terbuka Menggunakan Regresi	Penelitian kuantitatif, menggunakan metode regresi probit dan regresi logit.	Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka sedangkan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat pengangguran.	<p>Persamaannya adalah sama-sama menggunakan Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Pengangguran.</p> <p>Perbedaan terletak pada variabel independen yang terdapat Indeks Pembangunan Manusia, kemudian perbedaan lokasi dan tahun penelitian.</p>
4.	Firdayanti dan Yacoub, 2019. Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat	Penelitian ini tergolong penelitian eksplanatori (<i>Explanatory research</i>) yaitu penelitian penjelasan yang menunjukkan sebab akibat antara variabel-variabel penelitian.	Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan dan berdampak positif terhadap pengangguran. Pengaruh upah minimum menunjukkan pengaruh yang signifikan dan berdampak positif terhadap pengangguran.	<p>Persamaannya adalah sama-sama menggunakan Variabel Upah Minimum Regional dan Pengangguran.</p> <p>Perbedaan terletak pada variabel independen yang terdapat variabel Pertumbuhan ekonomi dan inflasi, kemudian perbedaan lokasi dan tahun penelitian.</p>
5.	Mulatsih, 2013. Pengaruh Tingkat Kepadatan Penduduk dan Upah Minimum	penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dengan	variabel kepadatan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengangguran dan	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan Variabel Upah Minimum Regional dan Pengangguran.

Tabel 2.1 - Lanjutan

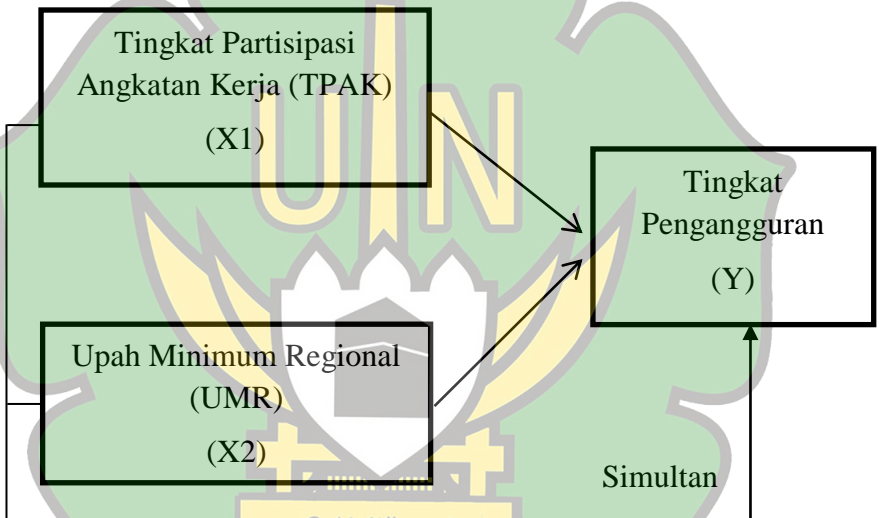
No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	terhadap Pengangguran di Indonesia Tahun 2013	menggunakan pengujian parsial (Uji t), simultan (Uji F) dan Uji koefisien Determinan (R^2).	variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengangguran.	Perbedaan terletak pada variabel independen yang menambahkan terdapat kepadatan penduduk, kemudian perbedaan lokasi dan tahun penelitian
6.	Nasruddin, Dkk 2017. Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran (Studi Kasus Kabupaten Aceh Utara)	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu data tahunan.	variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap tingkat pengangguran. variabel pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama mampu mempengaruhi tingkat pengangguran. angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran	Persamaannya adalah menggunakan Tingkat tenaga kerja dan Tingkat Pengangguran. Perbedaan terletak pada variabel independen yang terdapat variabel Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk, kemudian perbedaan lokasi dan tahun penelitian.
7.	Pramudjasi Dkk 2019. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendidikan serta Upah terhadap Pengangguran di Kabupaten Paser	Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. Menggunakan rumus regresi linear dan analisis computer menggunakan SPSS.	Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran. Upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.	Sama-sama menggunakan Variabel Upah Minimum Regional dan Pengangguran. Perbedaan terletak pada variabel independen yang terdapat variabel jumlah penduduk dan pendidikan, kemudian perbedaan lokasi dan tahun penelitian.

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
8.	Anggoro, 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan TPAK terhadap tingkat Pengangguran di kota Surabaya	Jenis penelitian ialah penelitian kausal pendekatan kuantitatif. Data sekunder dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.	Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tingkat partisipasi angkatan kerja sama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kota Surabaya.	Sama-sama terdapat Variabel Angkatan Kerja & Pengangguran. Perbedaan terletak pada variabel independen yang terdapat variabel Pertumbuhan ekonomi, kemudian perbedaan lokasi dan tahun penelitian.
9.	Saadah dan Ardyan, 2016. Analisis Pengaruh Upah Minimum Pekerja dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Pengangguran di Surabaya	Jenis penelitian ini menggunakan cara survey dan dokumentasi. Teknik sampling untuk mencari data peneliti memakai teknik time series	Upah Minimum Pekerja (UMP) memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Jumlah penduduk miskin (JPM) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran.	Sama-sama menggunakan Variabel Upah Minimum Regional dan Pengangguran. Perbedaan terletak pada variabel independen yang terdapat variabel jumlah penduduk, kemudian perbedaan lokasi dan tahun penelitian.
10.	Syahputra dan Nurhayati, 2019. Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah minimum dan pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi di Sumatera	Data penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data panel, yaitu data terdiri dari dua bagian yaitu: time series dan cross section.	Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sementara variabel pengeluaran pemerintah dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel Upah Minimum Regional dan Pengangguran. Perbedaan terdapat variabel independen pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan tingkat pendidikan kemudian perbedaan lokasi dan tahun penelitian.

2.7 Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teori tersebut seperti berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka berpikir



2.8 Hipotesis

Hipotesis adalah hasil sementara dari pada rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian telah disampaikan dalam bentuk pertanyaan (Sugiono, 2019). Hipotesis bisa diartikan sebagai dugaan yang mungkin saja benar dan juga mungkin salah. Adapun dalam penelitian ini memiliki hipotesis yaitu sebagai berikut:

- H01 : Diduga bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh negatif signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh.
- Ha1 : Diduga bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh.
- H02 : Diduga bahwa Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh.
- Ha2 : Diduga bahwa Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh.
- H03 : Diduga bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) tidak berpengaruh secara simultan terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh.
- Ha3 : Diduga bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh secara simultan terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (*quantitative method*) yang termasuk bagian dari penelitian eksplanasi yaitu penelitian yang menjelaskan tentang pengaruh variabel yang akan diteliti melewati pengujian hipotesis. Penelitian ini bersifat untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang ditimbulkan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya (Sujarweni 2021: 89). Data sekunder yang digunakan berupa data panel. Data panel (*pooled data*) adalah gabungan dari data runtun waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*).

Sumber data diperoleh dalam bentuk yang sudah rangkum, dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data dalam

penelitian ini yaitu data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Upah Minimum (UMR), dan data Pengangguran menggunakan data tingkat pengangguran terbuka per kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 2012-2022.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:225) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempat. Penelitian studi kepustakaan (*Library Reseach*) dan Lapangan (*Field Research*).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Teknik pengumpulan data sekunder dengan teknik penelitian Penelitian studi kepustakaan (*Library Reseach*) yang dimana teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data dari berbagai instansi terkait. Dalam penelitian ini menggunakan data yang telah terdapat dan tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS).

3.4 Definisi dan Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan penerangan terkait suatu cara yang digunakan atau dilakukan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *construct* menjadi variabel penelitian

yang ingin dibahas dan diambil kesimpulannya, menurut kerlinger variabel merupakan konstruk (*constructs*) atau suatu sifat yang ingin dipelajari yang mana peneliti lain dapat melakukan replikasi (pengulangan) penilaian dalam bentuk yang sama, serta mencoba meningkatkan bentuk pengukuran menjadi lebih baik. Maka definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Skala	Sumber Data
1	Tingkat Pengangguran (y)	pengangguran terbuka, data tahun 2012-2022.	Persen (%)	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (X_1)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), data tahun 2012-2022.	Persen (%)	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh
3	Upah Minimum Regional (X_2)	Upah Minimum Regional/Provinsi, data tahun 2012-2022.	Rupiah (Rp)	Badan Pusat Statistik (BPS)

Sumber : Tabel diolah 2022

3.5 Metode dan Teknik Analisis Data

3.5.1 Metode Analisis Data

Penelitian ini memakai model analisis regresi linier berganda berbentuk data panel (*pooled data*) yang

pengertiannya ialah gabungan dari data runtunan waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*). Analisis regresi data panel pada penelitian ini di pakai agar dapat mengidentifikasi hubungan antar variabel bebas yaitu merupakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR), terhadap variabel terikat yaitu Tingkat Pengangguran (TP) (Basuki dan Nano, 2016:276). Model rumus yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon$$

Persamaan diatas merupakan persamaan umum dari regresi data panel. Berdasarkan persamaan umum ini dengan memasukkan variabel-variabel dari definisi operasional variabel maka rumus dalam penelitian ini dispesifikasikan sebagai berikut :

$$\text{LnTP}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LnTPAK}_{it} + \beta_2 \text{LnUMR}_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel dependen, ialah Tingkat Pengangguran

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi variabel independen

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

UMR = Upah Minimum Regional

i = Kabupaten/Kota
t = Tahun
 ε = Error term

3.5.2 Uji Goodness Of Fit

Untuk menentukan model yang tepat dalam analisis regresi data panel, digunakan uji *Goodness Of Fit* yaitu dengan melakukan *uji chow*, *uji Hausman* dan *uji Lagrenge Multilier* (Hidayat dan Nalle, 2017).

1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model *common effect model* atau *fixed effect model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Apabila hasil uji ini menunjukkan probabilitas *chi-cquere* $> 0,05$ maka model yang dipilih adalah *common effect model*. Sebaliknya, apabila probabilitas *chi-squere* $< 0,05$ maka model yang sebaiknya dipakai yaitu model *fixed effect model* atau bisa disebut dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_1 : *Fixes Effect Model* (FEM)

Jika uji Chow memilih *fixed effect model* maka langkah selanjutnya melakukan *random effect model* dan setelah itu barulah melakukan uji *hauman test*

untuk memilih *fixed effect model* atau *random effect model*

2. Uji Hausman

Uji ini bertujuan untuk mengetahui model estimasi yang sebaiknya dipakai yaitu *fixes effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM). Jika probabilitas dari *cross-section random* $< 0,05$ maka model yang digunakan adalah *fixed effect model*. Dan sebaliknya jika probabilitas dari *cross-section random* $> 0,05$ maka model yang digunakan adalah *random effect model*.

Adapun hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_1 : *Fixes Effect Model* (FEM)

Jika uji Hausman memilih *fixed effect model* maka yang harus dilakukan selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Namun jika uji hauman memilih *Random Effect model* maka uji yang harus dilakukan yaitu uji *Lagrange Multiplier*.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk mengetahui apakah model *random effect model* yang paling tepat digunakan. Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi-*

square dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika $LM >$ dari nilai *chi-square* maka akan menerima H_0 artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel adalah *common effect model* bukan metode *random effect model* (Rukmana, 2019).

3.5.3 Teknik Analisis Data

Terdapat 3 metode pendekatan fundamental yang dipakai dalam menelaah panel data:

a) Metode *Common effect Model* (CEM)

Adalah sebuah strategi data panel yang sangat sederhana dikarenakan menyatukan *data time series* dan *data cross section*. Metode ini tidak memperhatikan dimensi waktu ataupun individu, yang mana disebut bahwa aktivitas data suatu penelitian tetap sama di setiap waktu. *Ordinary least square* (OLS) menjadi pendekatan pada metode ini atau dengan sebutan lain teknik kuadrat yang paling kecil guna menduga model data panel (Basuki & Pratowo, 2016).

b) Metode Efek tetap (*Fixed Effect*)

Metode ini adalah suatu metode untuk memahami adanya ketidak samaan antara objek dengan

konstanta antar objek. Untuk menaksir data panel model *Fixed Effect* memakai teknik variabel *dummy* guna mencari suatu variasi intersep sesama penelitian. Seharusnya intersep antar setiap individu berlainan akan tetapi sloponya pasti sama antar setiap individu. Dalam metode ini, estimasi bisa dilakukan tanpa pembobotan (*no weight*) atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)* dan pembobotan (*cross section weight*) atau *General Least Square (GLS)*. Model ini sangat pantas dalam memerhatikan perubahan perilaku data di setiap variabel yang mana data akan menjadi dinamis ketika mempresentasikan data (Basuki & Pratowo, 2016).

c) Metode Efek Random (*Random Effect*)

Random Effect untuk mengalahkan kekurangan metode efek tetap yang memakai variabel semu, yang mana model akan mendapati ketidakpastian. Dengan tidak memakai variabel semu, metode efek random memakai residual, yang dikira mempunyai kaitan antar waktu dan antar objek. Pada model ini dilakukan mengestimasi data panel, dan variabel gangguan bisa saja mempunyai keterkaitan antar waktu dan individual. Manfaat yang dapat diambil dengan memakai model *Random Effect* yaitu dapat

menghapus heteroskedastisitas (Basuki & Pratowo, 2016).

3.6 Pengujian Hipotesis

Hipotesis ialah hasil analisis sementara dari rumusan masalah dalam sebuah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian lazim disusun berupa kalimat pertanyaan (sugiyono, 2014:93). Pengujian hipotesis diperlukan dalam mengkaji sebuah penelitian, tujuannya untuk memperhatikan bagaimana hasil yang akan didapatkan bisa sama dengan hipotesis yang telah diperlihatkan pada penelitian.

3.6.1 Uji Parsial (T)

Uji Parsial (T) dilakukan untuk mengetahui “pengaruh dari masing-masing variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Kriteria pengujian yang digunakan dengan membandingkan nilai Prob. dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05). Hipotesis yang digunakan untuk mengetahui hasil dari uji t yaitu sebagai berikut:

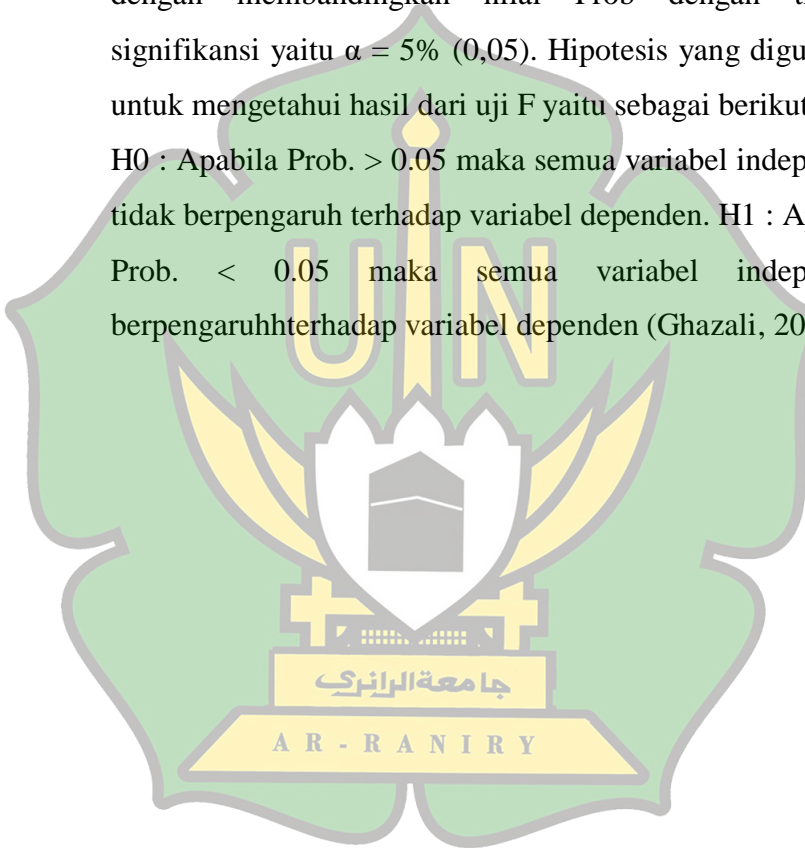
H_0 : Apabila Prob. > 0.05 maka masing-masing variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen”.

H_1 : Apabila Prob. < 0.05 maka masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghazali, 2016).

3.6.2 Uji Simultan (F)

Uji Simultan (F) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian yang digunakan dengan membandingkan nilai Prob dengan tingkat signifikansi yaitu $\alpha = 5\%$ (0,05). Hipotesis yang digunakan untuk mengetahui hasil dari uji F yaitu sebagai berikut:

H₀ : Apabila Prob. > 0.05 maka semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. H₁ : Apabila Prob. < 0.05 maka semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghazali, 2016).

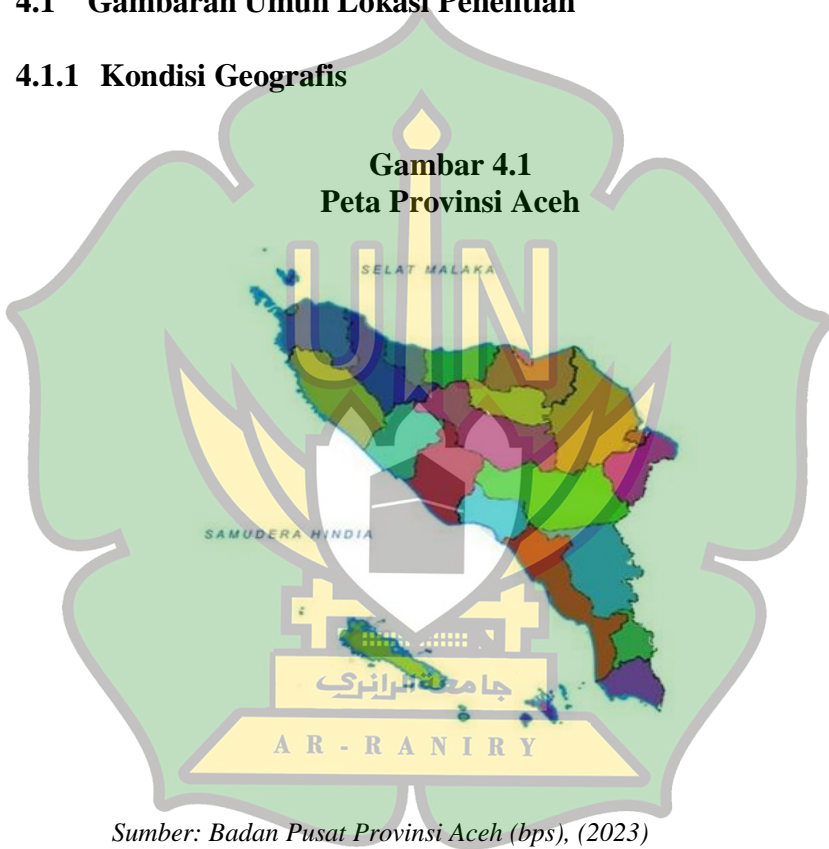


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis



Aceh merupakan provinsi yang terletak di ujung laut Pulau Sumatera dan provinsi paling barat di Indonesia, dengan luas daerah mencapai 57.956 km² dan luas wilayah berkisar 3,02 persen dari luas negara Indonesia, dengan Ibukota Banda Aceh, yang memiliki luas wilayah 56.758,85 km² atau

5.675.850 Ha (12,26 persen dari luas pulau Sumatera), wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.479.802 Ha dengan garis pantai 2.666,27 km². Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 276 kecamatan, 755 mukim dan 6.423 gampong atau desa serta jumlah penduduk di Provinsi Aceh adalah 5.274.871 jiwa.

Maka dalam penelitian ini, 23 Kabupaten/Kota akan menjadi sampel dalam penelitian dengan judul pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan upah minimum regional (UMR) terhadap pengangguran di Provinsi Aceh. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Aceh:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk menurut Kabupaten di Provinsi Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Simeulue	92.87
2	Aceh Singkil	126.51
3	Aceh Selatan	232.41
4	Aceh Tenggara	220.86
5	Aceh Timur	422.40
6	Aceh Tengah	215.58
7	Aceh Barat	198.74
8	Aceh Besar	405.54

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)
9	Pidie	435.28
10	Bireuen	436.42
11	Aceh Utara	602.79
12	Aceh Barat Daya	150.78
13	Gayo Luwes	99.53
14	Aceh Tamiang	294.36
15	Nagan Raya	168.39
16	Aceh Jaya	93.16
17	Bener Meriah	161.34
18	Pidie Jaya	158.40
19	Banda Aceh	252.90
20	Sabang	41.20
21	Langsa	185.97
22	Lhokseumawe	188.71
23	Subulussalam	90.75
Aceh		5.274.871

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2023)

4.2 Deskripsi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga data yaitu data tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan upah minimum regional (UMR) mulai dari tahun 2012 s/d 2022. Berikut tabel data sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) mulai dari tahun 2012 s/d 2022

No	Tahun	TPT (%)	TPAK (%)	UMR (Rp)
1	2012	9,10	61,77	1.400.000
2	2013	10,30	62,07	1.550.000
3	2014	9,02	63,06	1.750.000
4	2015	9,93	63,44	1.900.000
5	2017	6,57	63,74	2.500.000
6	2018	6,36	64,24	2.700.000
7	2019	6,20	63,36	2.916.810
8	2020	6,59	65,15	3.165031
9	2021	6,30	64,15	3.165031
10	2022	6,17	65,12	3.166460

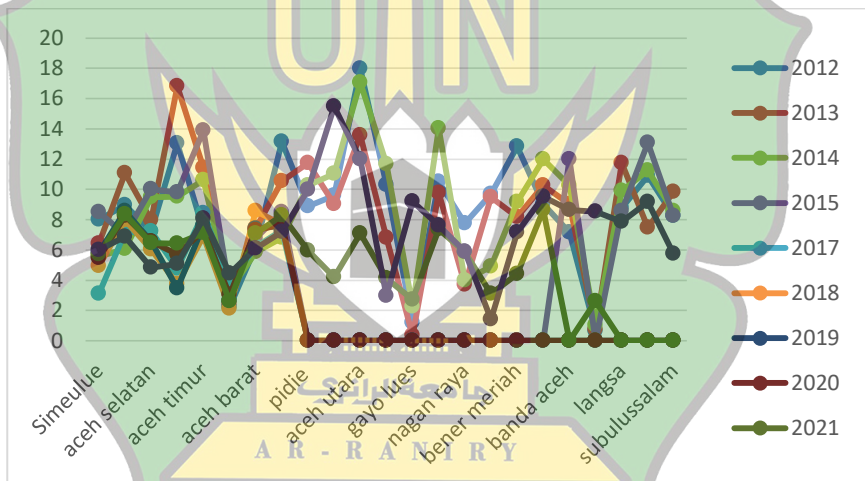
Sumber: BPS Provinsi Aceh (2023)

Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa selama rentang waktu 10 tahun terakhir tingkat TPT di Provinsi Aceh mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 TPT mencapai 6,57% menurun dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan TPT sebesar 6,59%. Sedangkan untuk TPAK terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 sebesar 64,24% yang kemudian turun pada tahun 2019 sebesar 63,36% dan melonjak naik ditahun berikutnya. UMR mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dimana yang paling tinggi terdapat pada tahun 2022 sebesar Rp 3.166.460 dan yang paling rendah pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.400.000.

4.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada penelitian ini data pengangguran menggunakan data tingkat pengangguran terbuka. Diketahui tingkat Pengangguran Terbuka terjadi karena kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia sedangkan banyaknya angkatan kerja yang mencari pekerjaan. Berikut data Tingkat Pengangguran per Kabupaten Provinsi Aceh sebagai berikut:

Gambar 4.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh 2012-2022



Sumber: BPS Provinsi Aceh diolah (2023)

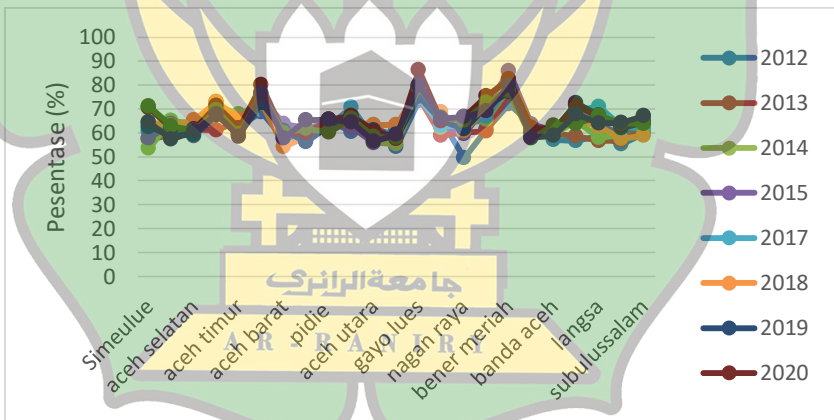
Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah tingkat pengangguran di provinsi Aceh yang tertinggi terjadi pada tahun 2022 di kabupaten Aceh Utara dengan jumlah mencapai 17,79% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 8,31%,

dimana kondisi tersebut disebabkan karena adanya laju pertumbuhan ekonomi, sehingga adanya penurunan terhadap tingkat pengangguran.

4.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan variabel bebas dalam penelitian ini, TPAK merupakan penduduk dengan umur usia aktif kerja dihitung dari usia 15-65 tahun. Berikut data TPAK per Kabupaten Provinsi Aceh sebagai berikut:

Gambar 4.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Aceh 2012-2022



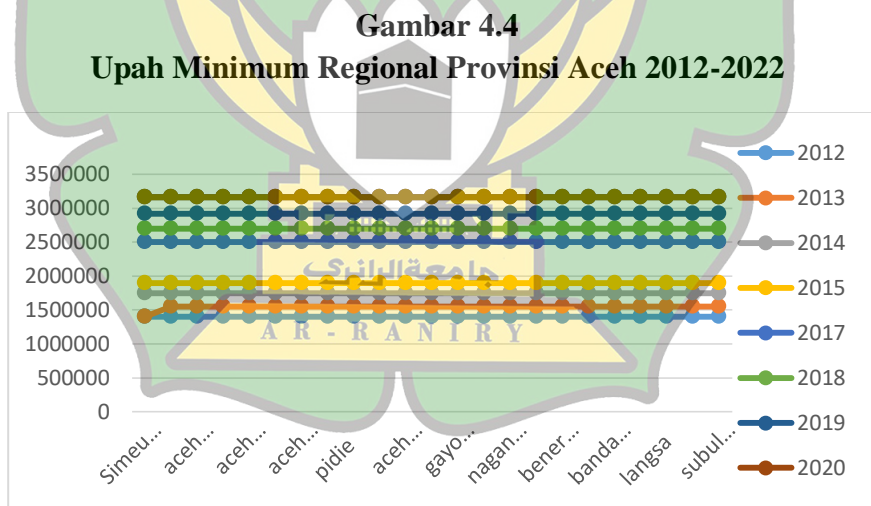
Sumber: BPS Provinsi Aceh (2023)

Dari gambar menunjukkan bahwa TPAK provinsi Aceh setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Provinsi Aceh pada tahun 2017-2020 dengan tingkat partisipasi angkatan kerja paling tinggi terdapat di Kabupaten Gayo Lues dengan angka 86.36% di tahun

2020. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja dengan terendah adalah Kabupaten Kota Aceh Barat dengan angka 54.27% pada tahun 2018.

4.2.3 Upah Minimum Regional (UMR)

Upah minimum regional merupakan bayaran atau hasil pendapatan atas suatu pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seseorang sebagai tenaga kerja sebagai bentuk apresiasi yang diberikan oleh atasannya. Satuan ukur atau indikator upah minimum regional adalah rupiah. Berikut Data Tingkat Upah Minimum Regional di Aceh Tahun 2012-2022 :



Sumber: BPS Provinsi Aceh (2023)

Diketahui dari gambar diatas dapat di lihat pada tahun berjalan upah minimum regional di Provinsi Aceh selalu

mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Kenaikan upah minimum regional di duga akan terus mengalami peningkatan seiring perkembangan waktu yang menuntut pendapatan semakin tinggi guna kesejahteraan masyarakatnya.

4.3 Estimasi Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh. Ada tiga macam pendekatan estimasi data panel yang akan digunakan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dimana untuk menentukan model terbaik yang akan digunakan dengan melakukan uji chow (*Chow Test*), uji hausman (*Hausman Test*), dan uji LM (*Lagrange Multiplier Test*).

4.3.1 Chow Test

Uji ini dilakukan untuk mengetahui dan memilih model yang terbaik antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*, maka digunakan uji F *Restricted* dengan membandingkan nilai *cross-section* F. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*, diterima apabila *cross-section* $F > 0.05$

H_1 : *Fixed Effect Model*, diterima apabila *cross-section* $F < 0.05$

Hasil *Chow Test* dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	13.765740	(22,205)	0.0000
Cross-section Chi-square	208.648834	22	0.0000

Sumber : Data diolah dengan E-Views (2023)

Pengolahan diatas menunjukkan nilai probabilitas cross-section F sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 5\%$ atau 0,05 yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Fixed Effect Model lebih baik digunakan dibandingkan dengan Common Effect Model.

4.3.2 Hausman Test

Dilakukan untuk mengetahui dan memilih model yang terbaik antara *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Maka digunakan uji dengan nilai *cross-section* random. Pengujian dilakukan dengan hipotesis:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan dengan menggunakan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Jika nilai probabilitas *cross-section random* $> 0,05$

maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

- b) Jika nilai probabilitas *cross-section random* $< 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Hasil *Hausman Test* dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	38.838566	2	0.0000

Sumber : Data diolah dengan *E-Views* (2023)

Pengolahan diatas menunjukkan hasil dari *Hausman Test* dimana nilai probabilitas cross-section F sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 5\%$ atau 0,05 yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Fixed Effect Model lebih baik digunakan dibandingkan dengan Common Effect Model.

4.3.3 Model Regresi Panel *Fixed Effect Model (FEM)*

Pada estimasi regresi data panel, model terbaik yang diperoleh yaitu *Fixed Effect Model*. Hasil pengolahan data menggunakan FEM pada penelitian ini terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.13621	1.651095	6.139079	0.0000
X1	-0.414075	0.415910	-0.995588	0.3206
X2	-0.451754	0.070691	-6.390570	0.0000

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.791429	Mean dependent var	1.791662
Adjusted R-squared	0.767011	S.D. dependent var	0.620472
S.E. of regression	0.299495	Akaike info criterion	0.528883
Sum squared resid	18.38793	Schwarz criterion	0.902588
Log likelihood	-35.82160	Hannan-Quinn criter.	0.679628
F-statistic	32.41170	Durbin-Watson stat	1.363989
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah dengan E-Views (2023)

Berdasarkan hasil estimasi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* yang ditunjukkan pada Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh selama periode penelitian tersebut sudah ada sebesar 10,13% tanpa dipengaruhi faktor-faktor yang terkait.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh periode 2012 s/d 2022 dengan nilai koefesien -0,414. Artinya apabila terjadi kenaikan tingkat partisipasi angkatan sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 30,244%

Upah Minimum Regional memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh periode 2012 s/d

2022, dimana nilai koefisien sebesar -0,451. Artinya apabila terjadi upah minimum regional tiap 1 persen maka akan menurunkan tingkat pengangguran di provinsi aceh sebesar 0.45%.

4.4 Uji Signifikansi (Uji T)

Tabel 4.6
Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.13621	1.651095	6.139079	0.0000
X1	-0.414075	0.415910	-0.995588	0.3206
X2	-0.451754	0.070691	-6.390570	0.0000

Sumber : Data diolah dengan E-Views (2023)

Pada Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas pada variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (X1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3206 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Pengangguran.

Variabel Upah minimum Regional (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel upah minimum regional terhadap pengangguran di Provinsi Aceh periode 2012 s/d 2022, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh positif.

4.5 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.7
Hasil Uji F

F- statistic	32,411170
Prob (F-statistic)	0,000000

Sumber : Data diolah dengan E-Views (2023)

Pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai F-statistic dalam metode Fixed Effect Model sebesar 32,4111 dan nilai probabilitas sebesar 0,000000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan variabel independen Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan upah minimum regional berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu pengangguran di Provinsi Aceh periode 2012 s/d 2022.

4.6 Pembahasan Penelitian

4.6.1 Pengaruh TPAK Terhadap Pengangguran

Berdasarkan hasil pengujian dan uraian diatas, diketahui tingkat partisipasi angkatan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran di provinsi Aceh dan tidak signifikan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya daerah dengan TPAK yang tinggi namun daerah tersebut lebih didominasi dengan sektor pertanian, dimana pengukuran angkatan kerja yang bekerja pada daerah-daerah tersebut kurang disebabkan masyarakatnya berkerja hanya mengandalkan SDA yang terdapat didaerahnya.

Hal diatas sesuai dengan teori Lewis (1959) dalam Rivai, dkk. (2014) yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain.

Terdapat beberapa faktor penentu yang membuat TPAK tidak begitu mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Aceh. Pertama, daerah aceh masih banyak didominasi sektor pertanian dan dagang dimana terdapat kecenderungan TPAK dengan rata-rata angkatan kerja tinggi namun mereka masih mengandalkan SDA di daerahnya untuk bertahan hidup. Kedua, potensi ekonomi pada daerah TPAK yang tinggi hampir tidak merata pada beberapa sektor sehingga dalam mendapatkan pekerjaan hanya sebatas mencukupi kebutuhan hari-hari saja. Sedangkan pada beberapa sektor disyaratkan adanya keterampilan khusus seperti pada sektor perdagangan dan industri. Ketiga, pertumbuhan angkatan kerja pada daerah TPT rendah lebih tinggi dari pertumbuhan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) terutama pada tiga sektor unggulan yaitu sektor perdagangan, industri dan pertanian.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rambe, Dkk (2019) dimana tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.

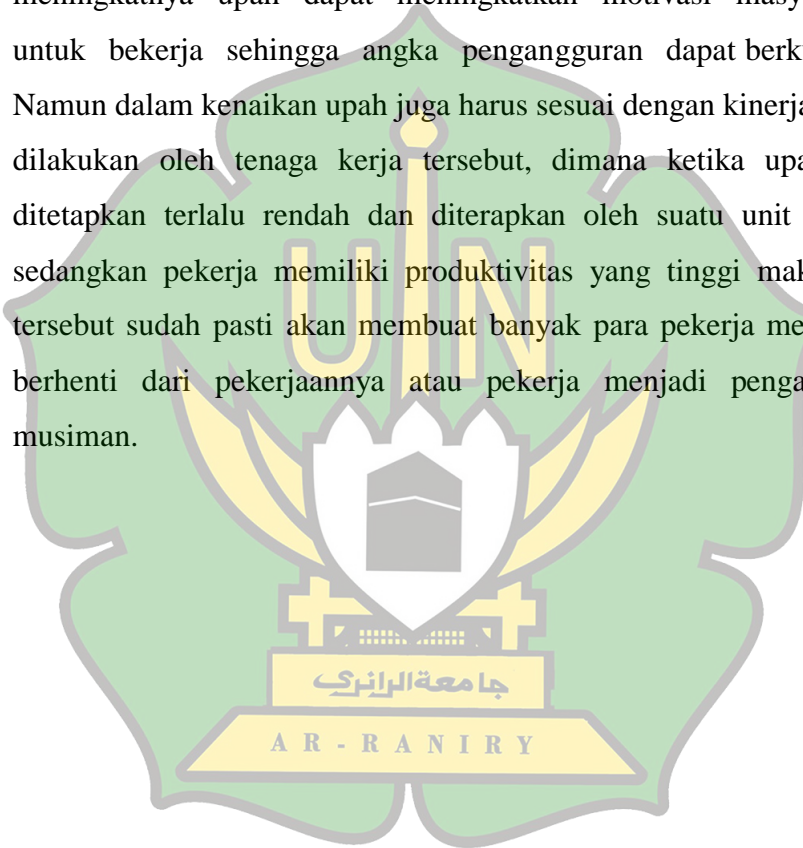
4.6.2 Pengaruh UMR Terhadap Pengangguran

Upah Minimum Regional (UMR) memiliki pengaruh negative namun signifikan terhadap pengangguran di provinsi Aceh. Hal ini dapat terjadi karena ketika terdapat kenaikan pada tingkat upah maka secara tidak langsung angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan akan memiliki minat untuk memperoleh pekerjaan tersebut atas dasar tercukupinya biaya hidup dan rasa puas terhadap upah yang diperoleh dengan tenaga yang dikeluarkan dalam bekerja. Hal ini berarti dengan adanya kenaikan upah akan menambah permintaan tenaga kerja dan permintaan ini akan memenuhi penawaran tenaga kerja di Provinsi Aceh, maka akan menurunkan jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Aceh.

Pernyataan ini sesuai dengan teori upah oleh Jhon Stuart Mill, dimana ketika upah yang akan diterima pekerja besar maka akan meningkatkan upaya kerja dari tenaga kerja sebaliknya jika jumlah dana tersebut berkurang akan mendorong penurunan kinerja karena upah yang diterima oleh pekerja minim (Sukirno, 2013).

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudjasi, dkk (2019) yang menyimpulkan bahwa upah memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Paser tahun 2007-2015. Artinya Jika upah naik maka, akan menurunkan tingkat pengangguran. Sebaliknya jika upah turun, maka akan menaikkan tingkat pengangguran.

Pada penelitian ini hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, apabila Upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah maka akan berakibat pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Sebaliknya bila meningkatnya upah dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk bekerja sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Namun dalam kenaikan upah juga harus sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh tenaga kerja tersebut, dimana ketika upah itu ditetapkan terlalu rendah dan diterapkan oleh suatu unit usaha sedangkan pekerja memiliki produktivitas yang tinggi maka hal tersebut sudah pasti akan membuat banyak para pekerja memiliki berhenti dari pekerjaannya atau pekerja menjadi penganggur musiman.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang dilakukan mengenai tingkat pengangguran terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan upah minimum regional di Provinsi Aceh dengan menggunakan model regresi data panel berupa Fixed Effect Model (FEM), maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Aceh. Kondisi ini terjadi karena Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) belum banyak diikuti dengan baik sehingga tidak mampu memberikan dampak terhadap pengangguran di Provinsi Aceh.
2. Upah minimum regional (UMR) memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Aceh, dimana apabila terjadi kenaikan Upah minimum regional (UMR) akan menurunkan pengangguran sebesar 0,45%. Hal ini dapat terjadi karena ketika Upah minimum regional (UMR) naik cenderung meningkatkan minat untuk mencari pekerjaan sehingga menurunkan tingkat pengangguran.
3. Hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan secara simultan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah

minimum regional (UMR) berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Aceh dimana nilai F-statistic sebesar 32,4111 dan nilai probabilitas sebesar 0,000000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. kemudian dengan Nilai estimasi R² sebesar 0,791429 yang artinya sebesar 79,14% variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah minimum regional (UMR) dapat menjelaskan variabel pengangguran dan sisanya sebesar 21,86% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Setelah melakukan serangkaian pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap pengangguran di Provinsi Aceh, maka terdapat beberapa saran yang diajukan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Terkait dengan hasil penelitian, peneliti menyarankan terkhusus pada pemerintah atau penyelenggara terkait agar giat meningkatkan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pada kegiatan BLK yang telah dijalankan agar pelatihan tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana semestinya sehingga dapat menciptakan tenaga kerja terlatih, usaha baru bahwan menciptakan lowongan kerja baru.

2. Pemerintah dalam menetapkan kebijakan upah minimum hendaknya lebih memperhatikan standar upah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi para tenaga kerja.
3. Pemerintah hendaknya memaksimalkan para angkatan kerja yang menganggur untuk melakukan wirausaha atau melakukan kegiatan produksi yang sifatnya kreatif. Ini dilakukan agar terjadi keseimbangan dalam memperoleh pendapatan dan menciptakan lowongan kerja baru.
4. Pemerintah hendaknya dalam mengambil dan menetapkan kebijakan ekonomi harus mempersiapkan inovasi yang membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara tinggi dalam segala sektor ekonomi dan sektor unggulan agar kemudian dapat bersamaan mengentaskan masalah pengangguran yang melonjak.
5. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian terkait dengan pembahasan ini atau serupa dan berharap peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain dalam melakukan penelitian terkait yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) serta tingkat pengangguran dan variabel-variabel lainnya yang tidak masuk ke dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, (2015), “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Surabaya” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, Vol. 3 No. 3, 2015.
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2022. Berita Resmi kata istilah https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=deskripsi_ind.desc&Istilah_page=5
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2022. Berita Resmi Tenaga Kerja. <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2022. Berita Resmi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1177/sdgs_11/1
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2022). Aceh Dalam Angka 2022. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Aceh.
- Basuki, A. T. & Pratowo N. (2017). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Basuki, Agus, Tri. dan Prawoto, Nano. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fadilah, P. (2018). “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau”. *Jurnal Publikasi*. UII Yogyakarta 2018.
- Falianty. (2019). *Teori Ekonomi Makro dan Penerapannya di Indonesia/Telisisa Aulia Falianty, - Ed. 1 – Cet 1*. Depok: Rajawali Pers.
- Firdayanti & Yacoub (2019), “Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran di

Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat” Prosiding SATIESP 2019.

- Franita, Riska (2016). Analisis Pengangguran di Indonesia. Nusantara (*Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*). Volume 1 Desember 2016. ISSN 2541-657X.
- Frida, A. (2021). “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia Tahun 2011-2020*”. Ponogoro.
- Ghazali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 edisi 8. Semarang: UNDIP.
- Gufron. (2020). “*Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pdrb, Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Pengangguran di Jawa Timur Tahun 2018*” Publikasi Ilmiah. Ekonomi Pembangunan.
- Hidayat, A, H. dan Nalle, F. W. (2017), Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15 No. 01. 2017.
- Izzah (2015). “*Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Provinsi, Terhadap Tingkat Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Jakarta 2004 -2013*”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I. Volume VII, Nomor 02, September 2015.
- Kartika dan Muslim. (2020) “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Di Indonesia*”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Bung Hatta.
- Meyvi Rine Mirah, Paulus Kindangen, Ita Pingkan F. Rorong (2020) Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi

Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol.21 No.1 (2020).

Mulatsih, (2015), “Pengaruh Tingkat Kepadatan Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran di Indonesia Tahun 2013”, *UG Jurnal*. Vol. 9 No. 05, 2015.

Mulyadi, S. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan/Mulyadi Subri – Ed. Revisi 5*. Jakarta: Rajawali Pers

Naf’an. (2014). *Ekonomi Makro; Tinjauan Ekonomi Syariah*. Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283: Graha Ilmu.

Nasruddin, dkk (2017), “Faktor - Faktor Penyebab Terjadina Pengangguran (Studi Kasus Kabupaten Aceh Utara)” *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, Vol. 3, No.2, 2017.

Nohe, dkk (2022) “Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Menggunakan Regresi Probit Dan Logit” *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya*, Vol. 2 (2022).

Pramudjasi, dkk (2019), “Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendidikan Serta Upah Terhadap Pengangguran di Kabupaten Paser”.

Pujoalwanto Basuki, (2014). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rambe, Dkk (2019). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi”. *E-Jurnal Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan*. Vol 8. No 1, Januari – April 2019.

Resmiati, N. H. (2018), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Kerja Perempuan Menikah Indonesia*. Yogyakarta : Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

- Rivai, dkk. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rukmana, T. A. (2019), *Analisis Determinasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Di Beberapa Provinsi Indonesia Tahun 2008-2017*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sa'adah & Ardyan, (2016), “Analisis Pengaruh Upah Minimum Pekerja Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Tingkat Pengangguran Di Surabaya” *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Sari, S. W. (2015). *Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)*. Tulungagung: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, (2021). “*Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi*” Jl. Wonosari Km.6 Demblaksari, Baturetno, Bangunpandan, Bantul, Yogyakarta.PUSTAKABARUPRESS.
- Sukirno, S. (2021). *Makroekonomi Teori Pengantar. (Edisi ke-3)*. Depok: Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono. (2013). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga, Jakarta: Raja Grasido Persada.
- Sukirno.(2012). *Makroekonomi Teori Pengantar/Sadono Sukirno-ed. 1-cet. 21*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suparmoko, M. & Sofilda, E. (2014). *Pengantar Ekonomi Makro*. Tangerang: CV. Wacana Mulia.

Syahputra & Nurhayani, (2019), “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi-Provinsi di Sumatera”. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. Vol. 8. No. 2, 2019.

Tusianti & Septiyanto (2020), “Analisis Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat” *Jurnal Ekonomi Indonesia*, Vol.9 No.2, 2020.

Yusuf, B. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.



Lampiran 1

Data Pengangguran (P), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) Per-Kabupaten Provinsi Aceh Tahun 2012-2022

Kabupaten	Tahun	Y (P)	x1 (TPAK)	x2 (UMR)
Simeulue	2012	8	60.55	1400000
	2013	6.42	57.19	1550000
	2014	5.57	53.41	1750000
	2015	8.51	57.81	1900000
	2017	3.12	63.51	2500000
	2018	4.95	64.37	2700000
	2019	5.82	62.5	2916810
	2020	5.47	70.37	3165031
	2021	5.71	71.15	3165031
	2022	6	64.44	3166460
Aceh Singkil	2012	8.96	62.16	1400000
	2013	11.07	59.08	1550000
	2014	6.08	65.17	1750000
	2015	7.03	63.83	1900000
	2017	7.14	59.43	2500000
	2018	7.96	63.11	2700000
	2019	8.58	59.09	2916810
	2020	8.24	61.97	3165031
	2021	8.36	62.85	3165031
	2022	6.88	57.33	3166460
Aceh Selatan	2012	7.21	61.72	1400000
	2013	7.95	61.41	1550000
	2014	9.49	63.66	1750000
	2015	10.01	58.63	1900000
	2017	7.24	59.7	2500000
	2018	6.03	65.42	2700000

	2019	6.54	59	2916810
	2020	6.54	61.41	3165031
	2021	6.46	60.85	3165031
	2022	4.82	60.69	3166460
Aceh Tenggara	2012	13.04	68.35	1400000
	2013	16.82	61.11	1550000
	2014	9.51	71.37	1750000
	2015	9.79	71.03	1900000
	2017	4.75	72.82	2500000
	2018	3.75	72.81	2700000
	2019	3.45	67.41	2916810
	2020	5.72	71.33	3165031
	2021	6.43	69.62	3165031
	2022	5.09	67.82	3166460
Aceh Timur	2012	7.26	62.96	1400000
	2013	11.42	65.13	1550000
	2014	10.61	67.87	1750000
	2015	13.89	63.14	1900000
	2017	8.42	59.55	2500000
	2018	6.92	65.75	2700000
	2019	7.61	59.37	2916810
	2020	7.26	61.92	3165031
	2021	7.13	59.48	3165031
	2022	8.07	58.45	3166460
Aceh Tengah	2012	2.22	68.69	1400000
	2013	2.42	72.72	1550000
	2014	3.32	72.23	1750000
	2015	3.31	74.58	1900000
	2017	3.91	76.8	2500000
	2018	2.11	72.48	2700000
	2019	2.65	72.5	2916810
	2020	3.05	79.96	3165031
	2021	2.61	76.3	3165031

	2022	4.44	76.37	3166460
Aceh Barat	2012	6.21	57.61	1400000
	2013	7.42	60.28	1550000
	2014	5.86	61.42	1750000
	2015	6.77	63.67	1900000
	2017	6.20	60.34	2500000
	2018	8.58	54.27	2700000
	2019	7.41	60.9	2916810
	2020	7.30	59.41	3165031
	2021	7.09	60.05	3165031
	2022	6.09	57.8	3166460
Aceh Besar	2012	13.15	59.7	1400000
	2013	13.15	57.87	1550000
	2014	10.53	59.09	1750000
	2015	6.81	61.9	1900000
	2017	8.49	59.17	2500000
	2018	7.29	58.51	2700000
	2019	7.67	56.18	2916810
	2020	7.62	60.02	3165031
	2021	7.70	61.67	3165031
	2022	8.28	65.31	3166460
Pidie	2012	7.19	65.04	1400000
	2013	8.88	65.46	1550000
	2014	11.73	65.6	1750000
	2015	10.25	64.34	1900000
	2017	7.64	63.05	2500000
	2018	7.24	61.73	2700000
	2019	6.83	63.05	2916810
	2020	6.45	65.55	3165031
	2021	7.28	60.29	3165031
	2022	5.94	65.47	3166460
Bireuen	2012	9.97	60.38	1400000
	2013	9.57	62.18	1550000

	2014	9.02	63.95	1750000
	2015	11.02	62.38	1900000
	2017	4.50	70.61	2500000
	2018	3.52	64.79	2700000
	2019	3.83	66.88	2916810
	2020	4.12	67.06	3165031
	2021	4.32	65.91	3165031
	2022	4.2	64.39	3166460
Aceh Utara	2012	15.47	60.2	1400000
	2013	17.97	62.09	1550000
	2014	13.58	55.88	1750000
	2015	17.05	55.65	1900000
	2017	11.02	57.21	2500000
	2018	10.14	63.39	2700000
	2019	8.65	61.17	2916810
	2020	8.56	60.31	3165031
	2021	8.31	58.47	3165031
	2022	7.08	56.37	3166460
Aceh Barat Daya	2012	11.97	54.25	1400000
	2013	10.3	58.14	1550000
	2014	6.79	55.3	1750000
	2015	11.66	62.26	1900000
	2017	3.16	62.01	2500000
	2018	3.93	63.38	2700000
	2019	4.29	58.02	2916810
	2020	3.93	57.58	3165031
	2021	4.04	57.91	3165031
	2022	4.12	59.18	3166460
Gayo Lues	2012	2.97	73.3	1400000
	2013	1.2	74.78	1550000
	2014	0.37	77.3	1750000
	2015	2.24	79.09	1900000
	2017	1.71	74.57	2500000

	2018	2.49	78.05	2700000
	2019	1.74	75.12	2916810
	2020	2.01	86.36	3165031
	2021	1.84	78.99	3165031
	2022	2.7	79.87	3166460
Aceh Tamiang	2012	9.19	65.28	1400000
	2013	10.49	58.93	1550000
	2014	9.75	62.16	1750000
	2015	14.03	63.44	1900000
	2017	5.43	62.82	2500000
	2018	6.21	68.7	2700000
	2019	6.04	65.07	2916810
	2020	7.97	64.84	3165031
	2021	5.87	66.43	3165031
	2022	7.38	66.01	3166460
Nagan Raya	2012	7.63	49.41	1400000
	2013	7.77	60.26	1550000
	2014	3.69	63.74	1750000
	2015	3.97	59.51	1900000
	2017	4.11	62.75	2500000
	2018	5.91	60.63	2700000
	2019	5.35	61.54	2916810
	2020	5.11	66.61	3165031
	2021	4.99	64.99	3165031
	2022	5.84	66.64	3166460
Aceh Jaya	2012	5.9	61.5	1400000
	2013	9.68	60.58	1550000
	2014	9.48	65.47	1750000
	2015	4.91	71.04	1900000
	2017	6.23	66.92	2500000
	2018	4.91	70.7	2700000
	2019	4.18	71.19	2916810
	2020	4.08	75.32	3165031

	2021	3.47	72.59	3165031
	2022	3.12	69.12	3166460
Bener Meriah	2012	1.41	72.02	1400000
	2013	0.63	76.46	1550000
	2014	0.74	78.57	1750000
	2015	1.04	85.94	1900000
	2017	1.06	79.49	2500000
	2018	1.06	78.43	2700000
	2019	1.03	77.05	2916810
	2020	1.35	82.52	3165031
	2021	1.24	77.53	3165031
	2022	2.61	79.71	3166460
	Pidie Jaya	2012	8.52	63.44
2013		12.82	60.81	1550000
2014		8.16	62.66	1750000
2015		9.18	63.64	1900000
2017		4.89	60.12	2500000
2018		5.02	61.17	2700000
2019		4.34	60.21	2916810
2020		6.58	62.13	3165031
2021		3.57	57.77	3165031
2022		4.4	57.89	3166460
Banda Aceh		2012	7.17	57.06
	2013	9.02	59.79	1550000
	2014	10.24	59.58	1750000
	2015	12	61.05	1900000
	2017	7.75	60.45	2500000
	2018	7.24	59.94	2700000
	2019	6.89	61.13	2916810
	2020	9.54	61.54	3165031
	2021	8.94	63	3165031
	2022	8.62	58.93	3166460
	Sabang	2012	9.53	56.65

	2013	12.5	58.56	1550000
	2014	7.48	64.88	1750000
	2015	7.62	71.42	1900000
	2017	3.00	69.52	2500000
	2018	4.19	65.48	2700000
	2019	4.60	72.4	2916810
	2020	4.81	71.55	3165031
	2021	3.56	63.71	3165031
	2022	4.01	67.81	3166460
Langsa	2012	8.79	58.85	1400000
	2013	11.74	56.51	1550000
	2014	9.89	57.94	1750000
	2015	8.55	63.43	1900000
	2017	7.03	70.84	2500000
	2018	7.12	62.59	2700000
	2019	7.69	67.24	2916810
	2020	9.75	66.58	3165031
	2021	7.21	67.04	3165031
	2022	7.85	63.9	3166460
Lhokseumawe	2012	10.88	55.34	1400000
	2013	7.46	56.77	1550000
	2014	11.23	59.1	1750000
	2015	13.06	59.38	1900000
	2017	10.51	62.6	2500000
	2018	12.51	57.48	2700000
	2019	11.01	61.94	2916810
	2020	11.99	63.17	3165031
	2021	11.16	63.91	3165031
	2022	9.15	64.11	3166460
Subulussalam	2012	8.25	59.77	1400000
	2013	9.85	63.77	1550000
	2014	8.55	66.71	1750000
	2015	8.24	65.9	1900000

	2017	4.91	61.85	2500000
	2018	6.44	58.93	2700000
	2019	7.25	64.43	2916810
	2020	6.93	64.18	3165031
	2021	6.26	63.78	3165031
	2022	5.75	67.04	3166460



Lampiran 2

Data *ln* Pengangguran (P), data *ln* Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan data *ln* Upah Minimum Regional (UMR) Per-Kabupaten Provinsi Aceh Tahun 2012-2022

Kabupaten	Tahun	LN _Y	LN _{X1}	LN _{X2}
Simeulue	2012	2.079442	4.103469	14.15198
	2013	1.859418	4.046379	14.25377
	2014	1.717395	3.977998	14.37513
	2015	2.141242	4.057162	14.45736
	2017	1.137833	4.151197	14.7318
	2018	1.599388	4.164648	14.80876
	2019	1.7613	4.135167	14.886
	2020	1.699279	4.253767	14.96767
	2021	1.742219	4.26479	14.96767
	2022	1.791759	4.165735	14.96812
Aceh Singkil	2012	2.19277	4.129712	14.15198
	2013	2.404239	4.078892	14.25377
	2014	1.805005	4.176999	14.37513
	2015	1.950187	4.156223	14.45736
	2017	1.965713	4.084799	14.7318
	2018	2.074429	4.144879	14.80876
	2019	2.149434	4.079062	14.886
	2020	2.109	4.12665	14.96767
	2021	2.123458	4.140751	14.96767
	2022	1.928619	4.048824	14.96812
Aceh Selatan	2012	1.975469	4.122608	14.15198
	2013	2.073172	4.117573	14.25377
	2014	2.250239	4.153556	14.37513
	2015	2.303585	4.071247	14.45736
	2017	1.979621	4.089332	14.7318
	2018	1.796747	4.180828	14.80876
	2019	1.877937	4.077537	14.886

	2020	1.877937	4.117573	14.96767
	2021	1.865629	4.108412	14.96767
	2022	1.572774	4.105779	14.96812
Aceh Tenggara	2012	2.568022	4.224642	14.15198
	2013	2.822569	4.112676	14.25377
	2014	2.252344	4.267878	14.37513
	2015	2.281361	4.263102	14.45736
	2017	1.558145	4.287991	14.7318
	2018	1.321756	4.287853	14.80876
	2019	1.238374	4.210793	14.886
	2020	1.743969	4.267317	14.96767
	2021	1.860975	4.243052	14.96767
	2022	1.627278	4.216857	14.96812
Aceh Timur	2012	1.98238	4.1425	14.15198
	2013	2.435366	4.176385	14.25377
	2014	2.361797	4.217594	14.37513
	2015	2.631169	4.145354	14.45736
	2017	2.13061	4.086816	14.7318
	2018	1.934416	4.18586	14.80876
	2019	2.029463	4.083789	14.886
	2020	1.98238	4.125843	14.96767
	2021	1.964311	4.08564	14.96767
	2022	2.088153	4.068172	14.96812
Aceh Tengah	2012	0.797507	4.229604	14.15198
	2013	0.883768	4.286616	14.25377
	2014	1.199965	4.279855	14.37513
	2015	1.196948	4.311872	14.45736
	2017	1.363537	4.341205	14.7318
	2018	0.746688	4.283311	14.80876
	2019	0.97456	4.283587	14.886
	2020	1.115142	4.381527	14.96767
	2021	0.95935	4.334673	14.96767
	2022	1.490654	4.33559	14.96812

Aceh Barat	2012	1.826161	4.053696	14.15198
	2013	2.004179	4.099	14.25377
	2014	1.76815	4.117736	14.37513
	2015	1.912501	4.153713	14.45736
	2017	1.824549	4.099995	14.7318
	2018	2.149434	3.993972	14.80876
	2019	2.00283	4.109233	14.886
	2020	1.987874	4.084463	14.96767
	2021	1.958685	4.095178	14.96767
	2022	1.806648	4.056989	14.96812
Aceh Besar	2012	2.576422	4.089332	14.15198
	2013	2.576422	4.058199	14.25377
	2014	2.354228	4.079062	14.37513
	2015	1.918392	4.12552	14.45736
	2017	2.138889	4.080415	14.7318
	2018	1.986504	4.069198	14.80876
	2019	2.037317	4.028561	14.886
	2020	2.030776	4.094678	14.96767
	2021	2.04122	4.121798	14.96767
	2022	2.113843	4.179145	14.96812
Pidie	2012	1.972691	4.175002	14.15198
	2013	2.183802	4.181439	14.25377
	2014	2.46215	4.183576	14.37513
	2015	2.327278	4.164182	14.45736
	2017	2.033398	4.143928	14.7318
	2018	1.979621	4.12277	14.80876
	2019	1.921325	4.143928	14.886
	2020	1.86408	4.182813	14.96767
	2021	1.985131	4.099166	14.96767
	2022	1.781709	4.181592	14.96812
Bireuen	2012	2.299581	4.100658	14.15198
	2013	2.258633	4.130033	14.25377
	2014	2.199444	4.158102	14.37513

	2015	2.399712	4.133245	14.45736
	2017	1.504077	4.257172	14.7318
	2018	1.258461	4.171151	14.80876
	2019	1.342865	4.2029	14.886
	2020	1.415853	4.205588	14.96767
	2021	1.463255	4.18829	14.96767
	2022	1.435085	4.164958	14.96812
Aceh Utara	2012	2.738903	4.097672	14.15198
	2013	2.888704	4.128585	14.25377
	2014	2.608598	4.023207	14.37513
	2015	2.83615	4.019082	14.45736
	2017	2.399712	4.046729	14.7318
	2018	2.316488	4.149306	14.80876
	2019	2.157559	4.113657	14.886
	2020	2.1471	4.099498	14.96767
	2021	2.11746	4.068514	14.96767
	2022	1.957274	4.031937	14.96812
Aceh Barat Daya	2012	2.482404	3.993603	14.15198
	2013	2.332144	4.062854	14.25377
	2014	1.915451	4.012773	14.37513
	2015	2.456164	4.131319	14.45736
	2017	1.150572	4.127296	14.7318
	2018	1.368639	4.149148	14.80876
	2019	1.456287	4.060788	14.886
	2020	1.368639	4.053175	14.96767
	2021	1.396245	4.05889	14.96767
	2022	1.415853	4.080584	14.96812
Gayo Lues	2012	1.088562	4.294561	14.15198
	2013	0.182322	4.31455	14.25377
	2014	-0.99425	4.347694	14.37513
	2015	0.806476	4.370586	14.45736
	2017	0.536493	4.311738	14.7318
	2018	0.912283	4.35735	14.80876

	2019	0.553885	4.319087	14.886
	2020	0.698135	4.458525	14.96767
	2021	0.609766	4.369321	14.96767
	2022	0.993252	4.3804	14.96812
Aceh Tamiang	2012	2.218116	4.178686	14.15198
	2013	2.350422	4.07635	14.25377
	2014	2.277267	4.129712	14.37513
	2015	2.641198	4.150095	14.45736
	2017	1.691939	4.140273	14.7318
	2018	1.826161	4.229749	14.80876
	2019	1.798404	4.175464	14.886
	2020	2.075684	4.171923	14.96767
	2021	1.769855	4.196149	14.96767
	2022	1.998774	4.189806	14.96812
Nagan Raya	2012	2.032088	3.900153	14.15198
	2013	2.05027	4.098669	14.25377
	2014	1.305626	4.154812	14.37513
	2015	1.378766	4.086144	14.45736
	2017	1.413423	4.139159	14.7318
	2018	1.776646	4.10479	14.80876
	2019	1.677097	4.119687	14.886
	2020	1.631199	4.198855	14.96767
	2021	1.607436	4.174233	14.96767
	2022	1.764731	4.199305	14.96812
Aceh Jaya	2012	1.774952	4.119037	14.15198
	2013	2.270062	4.103965	14.25377
	2014	2.249184	4.181592	14.37513
	2015	1.591274	4.263243	14.45736
	2017	1.829376	4.203498	14.7318
	2018	1.591274	4.258446	14.80876
	2019	1.430311	4.265352	14.886
	2020	1.406097	4.321746	14.96767
	2021	1.244155	4.284827	14.96767

	2022	1.137833	4.235844	14.96812
Bener Meriah	2012	0.34359	4.276944	14.15198
	2013	-0.46204	4.336768	14.25377
	2014	-0.30111	4.36399	14.37513
	2015	0.039221	4.453649	14.45736
	2017	0.058269	4.375631	14.7318
	2018	0.058269	4.362207	14.80876
	2019	0.029559	4.344455	14.886
	2020	0.300105	4.413041	14.96767
	2021	0.215111	4.350665	14.96767
	2022	0.95935	4.378395	14.96812
Pidie Jaya	2012	2.142416	4.150095	14.15198
	2013	2.551006	4.107754	14.25377
	2014	2.099244	4.137723	14.37513
	2015	2.217027	4.153242	14.45736
	2017	1.587192	4.096343	14.7318
	2018	1.61343	4.113657	14.80876
	2019	1.467874	4.097838	14.886
	2020	1.884035	4.129229	14.96767
	2021	1.272566	4.05647	14.96767
	2022	1.481605	4.058545	14.96812
Banda Aceh	2012	1.969906	4.044103	14.15198
	2013	2.199444	4.090838	14.25377
	2014	2.326302	4.08732	14.37513
	2015	2.484907	4.111693	14.45736
	2017	2.047693	4.101817	14.7318
	2018	1.979621	4.093344	14.80876
	2019	1.930071	4.113003	14.886
	2020	2.255493	4.119687	14.96767
	2021	2.190536	4.143135	14.96767
	2022	2.154085	4.07635	14.96812
Sabang	2012	2.254445	4.036892	14.15198
	2013	2.525729	4.070052	14.25377

	2014	2.012233	4.172539	14.37513
	2015	2.030776	4.268578	14.45736
	2017	1.098612	4.241614	14.7318
	2018	1.432701	4.181745	14.80876
	2019	1.526056	4.282206	14.886
	2020	1.570697	4.270397	14.96767
	2021	1.269761	4.154342	14.96767
	2022	1.388791	4.21671	14.96812
Langsa	2012	2.173615	4.074992	14.15198
	2013	2.463002	4.034418	14.25377
	2014	2.291524	4.059408	14.37513
	2015	2.145931	4.149937	14.45736
	2017	1.950187	4.260424	14.7318
	2018	1.962908	4.136606	14.80876
	2019	2.039921	4.208268	14.886
	2020	2.277267	4.198404	14.96767
	2021	1.975469	4.205289	14.96767
	2022	2.060514	4.157319	14.96812
Lhokseumawe	2012	2.386926	4.013496	14.15198
	2013	2.009555	4.039008	14.25377
	2014	2.418589	4.079231	14.37513
	2015	2.569554	4.083957	14.45736
	2017	2.352327	4.136765	14.7318
	2018	2.526528	4.051437	14.80876
	2019	2.398804	4.126166	14.886
	2020	2.484073	4.14583	14.96767
	2021	2.412336	4.157476	14.96767
	2022	2.213754	4.1606	14.96812
Subulussalam	2012	2.110213	4.090504	14.15198
	2013	2.287471	4.155283	14.25377
	2014	2.145931	4.200355	14.37513
	2015	2.109	4.188138	14.45736
	2017	1.591274	4.124712	14.7318

	2018	1.862529	4.07635	14.80876
	2019	1.981001	4.165579	14.886
	2020	1.93586	4.161692	14.96767
	2021	1.83418	4.15544	14.96767
	2022	1.7492	4.205289	14.96812

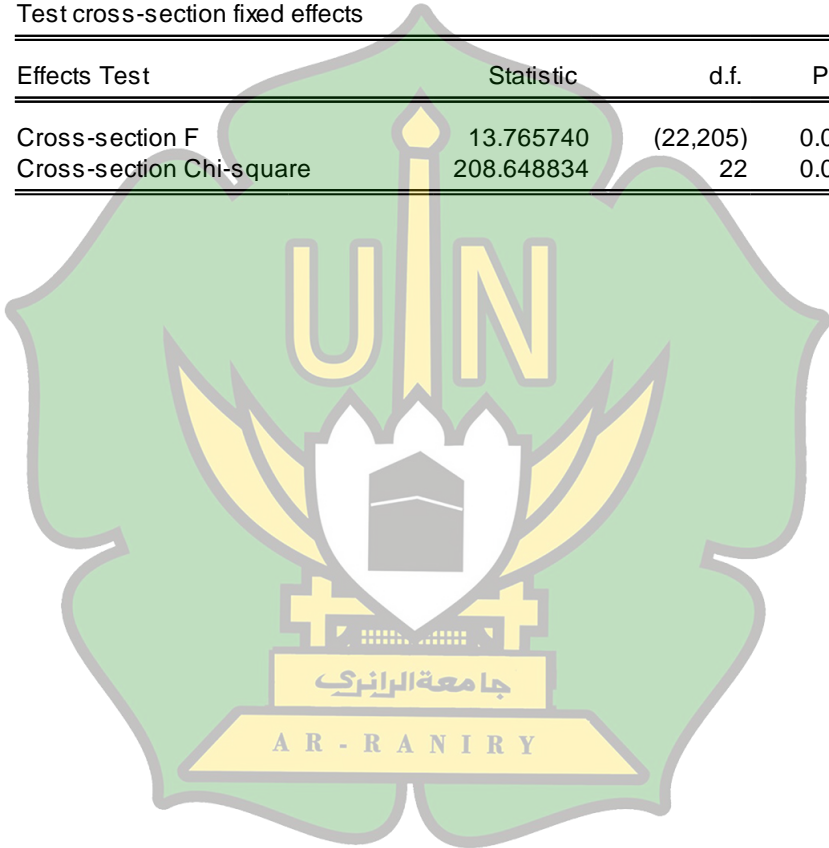


Lampiran 3

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	13.765740	(22,205)	0.0000
Cross-section Chi-square	208.648834	22	0.0000



Lampiran 4

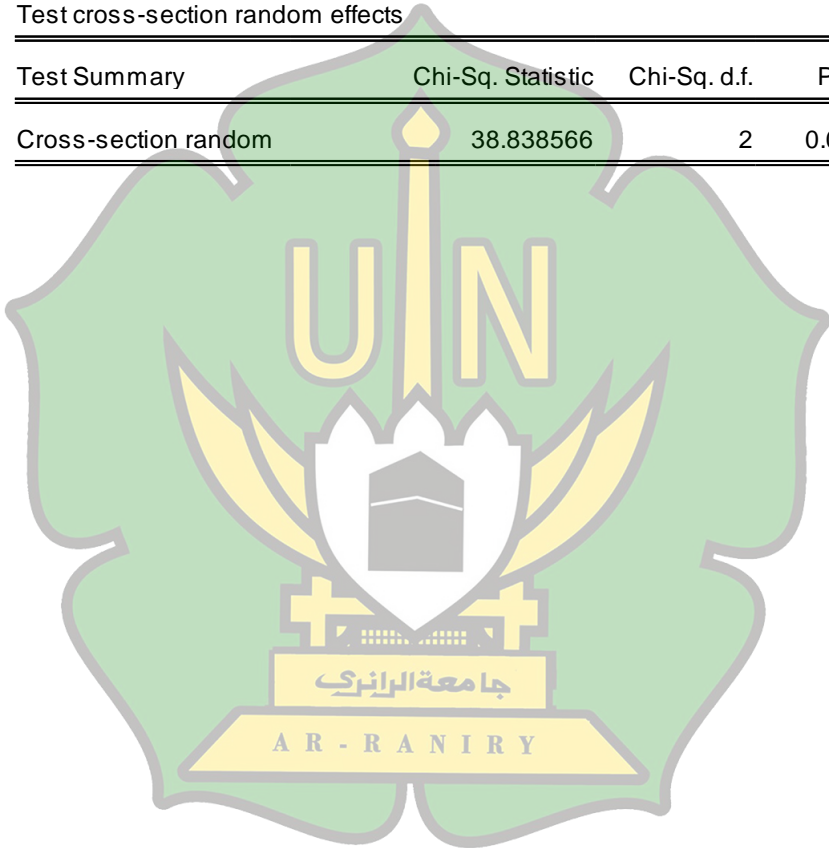
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	38.838566	2	0.0000



Lampiran 5

Uji Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 05/14/23 Time: 13:29
Sample: 2013 2022
Periods included: 10
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 230

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.13621	1.651095	6.139079	0.0000
X1	-0.414075	0.415910	-0.995588	0.3206
X2	-0.451754	0.070691	-6.390570	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.791429	Mean dependent var	1.791662
Adjusted R-squared	0.767011	S.D. dependent var	0.620472
S.E. of regression	0.299495	Akaike info criterion	0.528883
Sum squared resid	18.38793	Schwarz criterion	0.902588
Log likelihood	-35.82160	Hannan-Quinn criter.	0.679628
F-statistic	32.41170	Durbin-Watson stat	1.363989
Prob(F-statistic)	0.000000		

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Melya Nurtiwi Ningsi
NIM : 180604101
Tempat/Tgl. Lahir : Sigli, 27 Mei 2000
Alamat : Ds. Keupula Tanjong, Kec. Padang Tiji,
Kab. Pidie
No. Hp : 082163394823
Email Student : 180604101@student.ar-raniry.co.id
Email Pribadi : melyanurtiwii2705@gmail.com
Instagram : melyanurtiwi

Riwayat Pendidikan

1. SD : MIN Kota Sigli
2. SMP : MTsN 1 Kota Sigli
3. SMA : SMKN 1 Sigli
4. Universitas : UIN Ar-Raniry, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Yahman
Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD
Nama Ibu : Halimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Ds. Keupula Tanjong, Kec. Padang Tiji,
Kab. Pidie